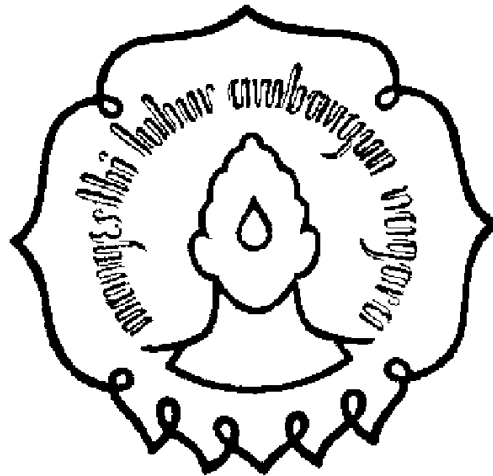


**PROSES URBANISASI DI KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Minat Utama Pendidikan Geografi**



**Oleh :
PRATIWI OKTAVIA
S.880908017**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

**PROSES URBANISASI DI KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Disusun oleh :
Pratiwi Oktavia
NIM S 880908017

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Dewan pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Soegiyanto, SU NIP. 19480404 197501 1 001
Pembimbing II	Dr. Moh. Gamal Rindarjono, M.Si NIP. 19640803 199512 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi PKLH

Prof. Dr. Sigit Santoso, M.Pd
NIP 19500930 197603 1 004

**PROSES URBANISASI DI KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Disusun oleh :

Pratiwi Oktavia

NIM S 880908017

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. Sigit Santoso, M.Pd
Sekretaris	Prof. Drs. Indro Wuryatno, M.Si
Anggota Penguji	Prof. Dr. H. Soegiyanto, SU
	Dr. Moh. Gamal Rindarjono, M.Si
Mengetahui			
Ketua Program	Prof. Dr. Sigit Santoso, M.Pd
Studi PKLH	NIP 19500930 197603 1 004		
Direktur Program	Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D
Pascasarjana	NIP 19570820 198503 1 004		

PERNYATAAN

Nama : Pratiwi Oktavia

NIM : S 880908017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul *Proses Urbanisasi di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar* betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, April 2010

Yang membuat pernyataan

Pratiwi Oktavia

ABSTRAK

Pratiwi Oktavia, S880908017. 2008. ***Proses Urbanisasi di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar***. Tesis : Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui serta mengukur besaran transformasi spasial daerah pertanian ke non pertanian, khususnya permukiman di daerah pinggiran Perkotaan Surakarta dalam kurun waktu 1998-2008. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk menempati di daerah pinggiran Perkotaan. 3) Untuk mengetahui sejauh mana perubahan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran seiring dengan perkembangan Kecamatan Jaten sebagai akibat *urban sprawl* perkotaan Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, populasi penelitian adalah seluruh daerah pinggiran Kota Surakarta di bagian timur yakni Kecamatan Jaten, sampel diambil berdasarkan sampling area yakni mengambil sampel di dua desa di Kecamatan Jaten, yaitu Desa Jaten dan Desa Ngringo. Teknik sampling yang digunakan adalah *Cluster Sampling* atau sampel gugus, dengan sampel sebanyak 100 orang kepala keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah overlay Peta Rupa Bumi Digital Indonesia tahun 1998 dan citra Ikonos hasil rekaman tahun 2008 dilengkapi data lapangan tahun 2009, dan analisis table silang.

Dari analisis data diperoleh hasil, transformasi spasial yakni konversi lahan pertanian ke permukiman selama kurun waktu 10 tahun mencapai 34%; konversi lahan pertanian ke industri mencapai 8 %, sedangkan konversi lahan pertanian ke sektor perdagangan dan jasa mencapai 17%. Transformasi ekonomi sosial terjadi di daerah penelitian seiring dengan adanya proses urbanisasi yakni pergeseran sudut pandang mengenai pekerjaan, pendidikan dan ketaatan dalam menjalankan ibadahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tinggal di Kecamatan Jaten seperti yang telah disampaikan di atas maka total faktor dari responden yaitu ada 8 macam yaitu 1) Tanahnya luas dan harga tanah yang masih murah; 2) Dekat dengan tempat kerja; 3) Ingin berdiri sendiri atau mempunyai rumah sendiri; 4) Tingkat pendapatan yang rendah; 5) Adanya sarana transportasi yang memadai ke pusat kota; 6) Adanya fasilitas sosial yang memadai; 7) Untuk membuka peluang usaha baru; 8) Mendapatkan warisan.

ABSTRACT

Pratiwi Oktavia, S880908017. 2008. ***The Urbanization Process in Subdistrict Jaten Karanganyar Regency***. Thesis: Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret University.

The objectives of research are: 1) to find out as well as to measure the size of agricultural area spatial transformation into non-agricultural area, particularly the settlement in Surakarta suburban areas during 1998-2008, 2) to find out reasoning people in urban fringe, and 3) to find out how far the social-economical and cultural change of society is in the suburban area along with the development of Subdistrict Jaten as the result of Surakarta urban sprawl.

This research employed a descriptive qualitative method; the population of research was all suburban areas of eastern Surakarta, that is, Subdistrict Jaten; the sample was taken based on the area sampling taking two villages in Subdistrict Jaten: Villages Jaten and Ngringo. The sampling technique used was Cluster Sampling, with 100 heads of family. Techniques of collecting data used were observation, documentation, and interview. Technique of analyzing data used was overlay of Indonesian Digital Earth Topography of 1998 and recorded Ikonos image of 2006 equipped with the field data of 2009, and cross-tabulation analysis.

From the data analysis, it can be found that spatial transformation, namely, the conversion of farming land into settlement during 10 years period reaches 34%; the conversion of farming land into industry reaches 6%, while the conversion of farming land into trading and service sector reaches 17%. The social economic transformation occurs in the research area along with the urbanization process involving the shift of perspective on the employment, education and worship devotion. Factors affecting the society residing in Subdistrict Jaten have been mentioned above so that the total factors from respondents include 1) the wide land and low cost of land; 2) proximity to the workplace; 3) desire to be independent or to have house; 4) low level of income; 5) adequate transportation vehicles to the downtown; 6) adequate social facility; 7) for opening new business; 8) to get inheritance.

MOTTO

“..Tetapi orang-orang yang dzalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun..”

(Q. S. Ar Ruum: 29)

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Q.S. Al Baqarah:153)

Demi masa,

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

(QS.Al-Ashr 1-3)

“Barang siapa menngghendaki dunia maka dia harus berilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat maka dia harus berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka ia harus berilmu”

(HR. Bukhori Muslim)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan:

Untuk Bapak sebagai tanda bakti,

Ibu (Almh) sebagai kenangan kelembutan kasih sayangnnya

Mba Ririn dan Mba Yesy serta Lyta untuk kasih sayangnnya

Mas Totok dan Mas Arif sebagai tanda hormat

Ivan Aditya Rahardian karena ketulusan cinta dan kasih sayangnnya

Keluarga Sumarsono Raharjo sebagai tanda hormat

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala petunjuk, limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Selesainya penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin melaksanakan penelitian.
2. Prof. Dr. Sigit Santoso, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Minat Utama Pendidikan Geografi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. H. Soegiyanto, SU, selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Dr. Moh. Gamal Rindarjono, M.Si, selaku Pembimbing II yang dengan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis sehingga dapat selesai.
5. Prof. Drs. Indro Wuryatno, M.Si, selaku sekretaris penguji tesis sehingga ujian dapat berjalan dengan lancar.
6. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Minat Utama Pendidikan Geografi yang telah memberi bekal ilmu selama menempuh studi.
7. Kepala BAKESBANGPOLLINMAS Kabupaten Karanganyar, Kepala Kantor BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, Camat Jaten Kabupaten Karanganyar, Kepala Desa Jaten, Kepala Desa Ngringo, Kepala Dusun Getas Kelurahan Jaten, Kepala Dusun Palur Kelurahan Ngringo, yang telah memberikan ijin penelitian dan data yang diperlukan penulis.

8. Warga Desa Jaten dan Desa Ngringo yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
9. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan kasih sayangnya telah memberi dukungan dan semangat dalam penulisan tesis ini.
10. Teman-teman Minat Utama Pendidikan Geografi angkatan 2008 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman di UNS (Anhar, Andi, Shodiq, Mas Nanang) yang memberi semangat sebagai teman kala suka dan duka.
12. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk perkembangan ilmu geografi.

Surakarta, April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN <i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR PETA	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Aplikatif.....	7
 BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	 8
A. Kajian Teori	8
1. Kaidah Urbanisasi	8
2. Kaidah Daerah Pinggiran Perkotaan	10
3. Dua Model Tata Guna Lahan di Pinggiran Kota	24
3.1. Modifikasi Model Von Thunen dan Model Sinclair	25
4. Kajian Tentang Struktur Intern Perkotaan	26
4.1. Teori Konsentris Burgess (Model Konsentris)	27
4.2. Teori Model Sektoral dari Homer Hyot	30
4.3. Teori Inti Ganda dari Harris dan Ullman	32
4.4. Perkembangan Daerah Pinggiran Perkotaan	33
5. Proses Perkembangan Spasial Sentripetal	37
5.1. Jenis dan Konsekuensi Spasial dari Perkembangan Spasial Sentripetal	38
5.2. Dampak Perkembangan Spasial Sentripetal	48
6. Proses Perkembangan Spasial Secara Vertikal	55
B. Kerangka Berfikir.....	59
 BAB III METODE PENELITIAN	 63
A. Tempat dan Waktu Penelitian	63
1. Tempat Penelitian	63

2. Waktu Penelitian.....	63
B. Bentuk dan Strategi Penelitian.....	64
C. Sumber Data	65
1. Data Primer.....	65
2. Data Sekunder.....	66
D. Teknik Sampling	67
E. Teknik Pengumpulan Data.....	68
F. Validitas Data.....	69
G. Analisis Data.....	70
H. Prosedur Penelitian.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	74
A. Deskripsi Daerah Penelitian.....	74
1. Deskripsi Geografis Daerah Penelitian	74
a. Letak, Batas dan Luas Daerah Penelitian.....	74
b. Penggunaan Lahan.....	80
2. Keadaan Penduduk	82
a. Jumlah Penduduk.....	82
b. Komposisi Penduduk	84
1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin..	85
2. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	86
3. Komposisi Penduduk Menurut Agama yang dianut	88
4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	91
c. Kepadatan Penduduk	93
B. Karakteristik Responden.....	95
1. Usia Responden dan Jumlah Anggota Keluarga	95
2. Tingkat Pendidikan.....	101
3. Mata Pencaharian	104
4. Tingkat Pendapatan Responden	108
C. Hasil dan Pembahasan.....	114
1. Transformasi Spasial	114
1.1. Konversi Lahan Persawahan.....	117
1.2. Konversi Lahan Pertanian ke Lahan Permukiman	132
1.2.1. Lahan Permukiman yang Terbentuk Secara Infiltratif.....	135
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penduduk Bertempat Tinggal di Daerah Pinggiran Perkotaan.....	143
3. Perubahan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat	176
3.1. Transformasi Sosial	176
3.2. Transformasi Pendidikan	187
3.3. Transformasi Budaya	191
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN.....	195
A. Kesimpulan	195
B. Implikasi	196
C. Saran	197

DAFTAR PUSTAKA	198
LAMPIRAN	201

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....	63
Tabel 2. Penggunaan Lahan di Daerah Penelitian Th 1998 dan Th 2008.....	80
Tabel 3. Jumlah dan Pesebaran Penduduk Kec. Jaten Th 1998 dan Th 2008...	83
Tabel 4. Jumlah Penduduk Daerah Penelitian Menurut Jenis Kelamin.....	84
Tabel 5. Komposisi Penduduk di Desa Ngringo Menurut. Umur dan Jenis Kelamin	85
Tabel 6. Komposisi Penduduk Tiap Desa Menurut Mata Pencaharian	87
Tabel 7. Komposisi Penduduk di Daerah Penelitian Menurut Agama yang dianut.....	90
Tabel 8. Tingkat Pendidikan Masing-masing Desa	92
Tabel 9. Perbandingan Kepadatan Penduduk Th 1998 dan Th 2008.....	94
Tabel 10. Jumlah Responden Berdasarkan Usia di Daerah Penelitian	97
Tabel 11. Jumlah Anggota Keluarga di Daerah Penelitian	100
Tabel 12. Tingkat Pendidikan Responden di Daerah Penelitian	103
Tabel 13. Mata Pencaharian Pokok Responden di Daerah Penelitian.....	106
Tabel 14. Tingkat Pendapatan di Jaten	111
Tabel 15. Tingkat Pendapatan di Ngringo	112
Tabel 16. Luas Penggunaan Lahan Desa Ngringo.....	122
Tabel 17. Luas Penggunaan Lahan Desa Jaten	127
Tabel 18. Harga Lahan di Daerah penelitian Tahun 2009	144
Tabel 19. Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Tempat Tinggal ke Tempat Kerja	148
Tabel 20. Jumlah Responden Berdasarkan Keinginan untuk Berdiri Sendiri	152
Tabel 21. Tingkat Pendapatan di Jaten	155
Tabel 22. Tingkat Pendapatan di Ngringo	155
Tabel 23. Jenis Jalan Menurut Jenis Permukaan Daerah Penelitian	158
Tabel 24. Jumlah Sarana Transportasi (Kendaraan Bermotor)	159
Tabel 25. Jumlah Sarana Transportasi (Kendaraan Tidak Bermotor)	160
Tabel 26. Banyaknya Sarana Kesehatan di Daerah Penelitian.....	164
Tabel 27. Banyaknya Petugas Kesehatan di Daerah Penelitian	165
Tabel 28. Banyaknya Tempat Ibadah di Daerah Penelitian.....	167
Tabel 29. Banyaknya Sarana Perdagangan di Daerah Penelitian	169
Tabel 30. Banyaknya Bank dan Koperasi di Daerah Penelitian	172
Tabel 31. Banyaknya Industri Berdasarkan Jenisnya di Daerah Penelitian ...	174
Tabel 32. Mata Pencaharian Pokok Responden di Daerah Penelitian	177
Tabel 33. Perubahan Banyaknya RT dan RW Daerah Penelitian Tahun 1998 dan Tahun 2008	185
Tabel 34. Tingkat Kelulusan Pendidikan Daerah penelitian Th 1998 dan Th 2008	188

DAFTAR PETA

No.		Halaman
1.	Administrasi Kecamatan Jaten	76
2.	Daerah Penelitian	77
3.	Administrasi Desa Jaten	78
4.	Administrasi Desa Ngringo	79
5.	Penggunaan Lahan Desa Ngringo Th 1998	125
6.	Penggunaan Lahan Desa Ngringo Th 2008	126
7.	Penggunaan Lahan Desa Jaten Th 1998.....	130
8.	Penggunaan Lahan Desa Jaten Th 2008	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Zone Permukiman Kampung	17
Gambar 2. Dua Model Penggunaan Tata Guna Lahan di Pinggiran Kota	24
Gambar 3. Bagan Teori Konsentris dari Burgess	28
Gambar 4. Bagan Model Sektoral (Homer) dan Bagan Model Teori Inti Ganda (Harris Ullman)	31
Gambar 5. Diagram Alir Kerangka Berpikir Penelitian	62
Gambar 6. Diagram Batang Penggunaan Lahan	81
Gambar 7. Diagram Batang Komposisi menurut Mata Pencapaian Ngringo dan Jaten	87
Gambar 8. Diagram Batang Komposisi Penduduk Menurut Agama Jaten dan Ngringo	91
Gambar 9. Diagram Batang Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	93
Gambar 10. Diagram Lingkaran Jumlah Responden Berdasarkan Usia Kelurahan Jaten	98
Gambar 11. Diagram Lingkaran Jumlah Responden Berdasarkan Usia Kelurahan Ngringo	99
Gambar 12. Diagram Batang Distribusi Frekuensi Jumlah Anggota Keluarga Responden di Desa Jaten	101
Gambar 13. Diagram Batang Distribusi Frekuensi Jumlah Anggota Keluarga Responden di Desa Ngringo Permukiman	102
Gambar 14. Diagram Batang Tingkat Pendidikan Responden di Daerah Penelitian.....	104
Gambar 15. Diagram Lingkaran Responden Berdasarkan Mata Pencapaian di Desa Jaten	107
Gambar 16. Diagram Lingkaran Responden Berdasarkan Mata Pencapaian di Ngringo	108
Gambar 17. Diagram Lingkaran Penggunaan Lahan Th 1998 di Desa Ngringo	123
Gambar 18. Diagram Lingkaran Penggunaan Lahan Th 2008 di Desa Ngringo	123
Gambar 19. Diagram Lingkaran Penggunaan Lahan Th 1998 di Desa Jaten I	128
Gambar 20. Diagram Lingkaran Penggunaan Lahan Th 2008 di Desa Jaten	128
Gambar 21. Perumahan Dalem Asri Jaten	146
Gambar 22. Rumah Sebagai Tempat Tinggal dan Usaha di Desa Ngringo	147
Gambar 23. Diagram Batang Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Tempat Kerja	149
Gambar 24. Diagram Batang Distribusi Tingkat Pendapatan Responden	157
Gambar 25. Keadaan Jalan di Daerah Penelitian	159

Gambar 26. SD JATEN 02 di Jaten	162
Gambar 27. Rumah Sakit Sebagai Sarana Kesehatan di Jaten	165
Gambar 28. Apotek di Jaten	166
Gambar 29. Masjid Mujahidin Sebagai Tempat Ibadah di Jaten	168
Gambar 30. Gereja Kristen Jawa Kismorejo di Jaten	168
Gambar 31. Pasar Jaten dan Pasar Ngringo Sebagai Sarana Perdagangan	170
Gambar 32. Pusat Perbelanjaan di Jaten	171
Gambar 33. Salah Satu Bank di Jaten	172
Gambar 34. Keadaan Lingkungan di Daerah Penelitian.....	173
Gambar 35. Perusahaan Besar di Daerah Penelitian.....	175
Gambar 36. Home Industri untuk Menambah Pendapatan	182
Gambar 37. Kegiatan Posyandu di Daerah Penelitian	183
Gambar 38. Kegiatan PKK di Daerah Penelitian	187
Gambar 39. Sekolah Taman Kanak-kanak di Ngringo	190
Gambar 40. Sekolah Dasar di Daerah Penelitian	190
Gambar 41. Sekolah Menengah Pertama di Daerah Penelitian.....	191
Gambar 42. Masjid Al-Furqon yang digunakan juga untuk Sekolah	193

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara (*Questioner*)
Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data Penelitian
Lampiran 3. Perijinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surakarta sebagai kota besar kedua di Propinsi Jawa Tengah, merupakan pusat pertumbuhan orde pertama yang telah menjadi “magnet” terkuat bagi penduduk di daerah penyangga (hinterland), terutama daerah perdesaan sekitar kota tersebut. Keberadaan Kota Surakarta tersebut merupakan bagian dari daerah perkotaan (urban) di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Secara makro, pertumbuhan penduduk perkotaan Jawa berkembang sehingga Jawa telah dijuluki sebagai urban island. Mereka datang ke Kota Surakarta karena di tempat tersebut banyak pilihan untuk memperoleh berbagai kesempatan dalam upaya memperbaiki kehidupannya. Mereka datang ke Kota Surakarta dengan berbagai motif, meskipun motif ekonomi adalah unsur yang paling dominan. Mereka mempunyai persepsi dan harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada di daerah asal, terutama perdesaan. Meskipun demikian, pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Surakarta

selain disebabkan oleh proses migrasi, juga karena pertambahan alami. Kota Surakarta itu sendiri telah berkembang dalam proses interaksi dari komponen keadaan penduduk, teknologi, lingkungan dan organisasi perkotaan sehingga telah melahirkan “*ecological urban complex*”.(Yunus, 1985:34)

Pertambahan penduduk yang tinggi di Surakarta selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang. Kota Surakarta sebagai perwujudan geografis selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dua faktor utama yang sangat berperan adalah faktor penduduk (demografis) dan aspek-aspek kependudukan (Yunus, 1985: 21). Dari segi demografi yang paling penting adalah segi kuantitas. Aspek kependudukan seperti aspek politik, sosial, ekonomi, dan teknologi juga selalu mengalami perubahan. Kuantitas dan kualitas kegiatannya selalu meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk perkotaan, sehingga ruang sebagai wadah kegiatan tersebut selalu meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk perkotaan, sehingga ruang sebagai wadah kegiatan tersebut selalu mengalami peningkatan.

Untuk kota yang sudah padat bangunannya, semakin berkembangnya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan segala aspek kehidupannya, yang berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan kota tidak lagi dapat menampung kegiatan penduduk. Oleh karena wilayah kota secara administratif terbatas, maka harus mengalihkan perhatiannya ke daerah pinggiran kota. Selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya proses densifikasi permukiman di daerah pinggiran kota dengan berbagai dampaknya.

Akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan Kota Surakarta adalah adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kota ke daerah pinggiran kota (*urban fringe*) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kota ke arah luar (*urban sprawl*). Akibat selanjutnya di daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi spasial berupa proses densifikasi permukiman dan transformasi sosial ekonomi sebagai dampak lebih lanjut dari proses transformasi spasial. Proses densifikasi permukiman yang terjadi di daerah pinggiran kota merupakan realisasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang di daerah perkotaan. Daerah pinggiran kota (*urban fringe*) sebagai suatu wilayah peluberan kegiatan perkembangan kota telah menjadi perhatian banyak ahli di berbagai bidang ilmu seperti geografi, sosial, dan perkotaan sejak tahun 1930 an saat pertama kali istilah *urban fringe* dikemukakan dalam literatur. Besarnya perhatian tersebut terutama tertuju pada berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh proses ekspansi kota ke wilayah pinggiran yang berakibat pada perubahan fisik misal perubahan tata guna lahan, demografi, keseimbangan ekologis serta kondisi sosial ekonomi (Subroto, 1997: 26).

Kecamatan Jaten adalah merupakan daerah pinggiran Kabupaten Karanganyar yang berada di bagian barat, dalam satu dasa warsa terakhir di daerah Jaten terlihat adanya perubahan penggunaan lahan yang signifikan. Perubahan penggunaan lahan ini sangat nyata perubahan dari lahan pertanian ke non pertanian. Perubahan lahan pertanian ini sebagai konsekuensi logis meningkatnya aktivitas manusia dalam memilih berbagai macam kebutuhan hidupnya. Perubahan lahan yang paling nyata adalah yang dipergunakan sebagai lahan permukiman. Meningkatnya perubahan

lahan dari pertanian ke permukiman sebagai suatu indikasi adanya gejala *urban sprawl*.

Jaten sebagai daerah pinggiran Kabupaten Karanganyar menerima langsung adanya dampak dari urban sprawl. Menurut pakar perkembangan daerah pinggiran tidak lepas dari adanya suatu gerakan keluar dari perkotaan menuju luar Kota yang disebut sebagai gerakan sentrifugal. Daya sentrifugal adalah gerakan yang mendorong gerak keluar dari penduduk dan berbagai usahanya lalu terjadi dispersi kegiatan manusia dan relokasi sektor-sektor ke daerah pinggiran Kota dalam hal ini dari perkotaan Surakarta menuju ke daerah pinggiran Kota yakni Jaten. Beberapa hal yang memungkinkan terjadinya hal tersebut yakni relokasi dan dispersi kegiatan manusia ke arah Jaten diantaranya adalah harga lahan yang relatif lebih murah dibandingkan di Kota Surakarta, kemudian ketersediaan lahan yang cukup luas mengakibatkan adanya relokasi industri (misalnya : industri garmen) dari Kota Surakarta ke Jaten. Permukiman dalam bentuk koloni-koloni yang teratur (perumahan) juga dalam dasa warsa terakhir menjamur di daerah Jaten.

Akibat dari adanya gerakan sentrifugal dari daerah perkotaan, gerakan sentrifugal ini juga didorong adanya kemudahan aksesibilitas dari Jaten ke Surakarta yakni ditandai dengan dibangunnya jalan dua arah oleh Negara pada tahun 1996. Hal ini mengakibatkan terisnya lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi lahan permukiman. Disamping itu dengan terbukanya akses jalan yang lebih baik maka bertambahnya kemakmuran secara pribadi masyarakat yang memungkinkan orang

untuk mendapatkan perumahan lebih baik, entah dengan menyewa atau membeli menjadi milik pribadi. Perkembangan daerah pinggiran seperti di Jaten juga dicirikan dengan munculnya permukiman-permukiman golongan menengah ke bawah yang dihuni oleh kaum buruh yang bekerja disektor industri dengan demikian di daerah pinggiran kota seperti Jaten terlihat ada dua sisi wajah yang pertama munculnya permukiman-permukiman menengah ke atas sebagai akibat gerakan sentrifugal namun disamping itu wajah daerah pinggiran Kota seperti Jaten juga memperlihatkan permukiman yang dihuni oleh golongan menengah kebawah yakni para buruh pabrik yang justru datang dari daerah pedesaan.

Sesuai latar belakang tersebut di atas, nampak jelas bahwa perkembangan daerah perkotaan ke daerah pinggiran, berakibat sangat luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di pinggiran kota. Permasalahan yang muncul adalah permasalahan fisik kota serta permasalahan aktualisasi masyarakat terhadap perkembangan daerah pinggiran menjadi daerah kekotaan. Hal inilah yang menjadi *entry point* mengapa penelitian ini penting di lakukan, oleh karena itu penelitian ini akan mengangkat fenomena keruangan yang berkaitan dengan wilayah pinggiran kota di Perkotaan Surakarta, yakni **Proses Urbanisasi di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.**

B. Perumusan Masalah

Sesuai identifikasi masalah yang ada seiring dengan perkembangan perkotaan Surakarta, serta pembatasan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh manakah transformasi spasial daerah pertanian ke non pertanian, khususnya permukiman di daerah pinggiran Perkotaan Surakarta dalam kurun waktu 1998-2008?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk bertempat tinggal daerah pinggiran Perkotaan Surakarta ?
3. Bagaimanakah proses perubahan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran seiring dengan perkembangan Kecamatan Jaten sebagai akibat *urban sprawl* perkotaan Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah yang ada, seiring dengan perkembangan perkotaan Surakarta, perumusan masalah yang telah dikemukakan maka perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta mengukur besaran transformasi spasial daerah pertanian ke non pertanian, khususnya permukiman di daerah pinggiran Perkotaan Surakarta dalam kurun waktu 1998-2008.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk menempati di daerah pinggiran Perkotaan Surakarta.
3. Untuk mengetahui proses perubahan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran seiring dengan perkembangan Kecamatan Jaten sebagai akibat *urban sprawl* perkotaan Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menghasilkan sebuah thesis yang dapat berguna secara teoritis dan secara aplikatif.

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat:

1. Menyumbangkan bahan pemikiran terhadap teori-teori tentang perkembangan kota yang masih sangat minim, khususnya *tentang urban sprawl*.
2. Menyumbangkan ide-ide dalam pembelajaran yang berkaitan dengan pemahaman tentang daerah pinggiran perkotaan dalam pembelajaran Geografi di Sekolah Menengah.

Secara aplikatif, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat:

1. Menjadi pijakan dalam penentu kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan daerah pinggiran di Perkotaan Surakarta.
2. Menjadi acuan dalam penataan daerah pinggiran secara fisik maupun sosial.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Kaidah Urbanisasi

Urbanisasi sering diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, pengertian ini memang tidaklah salah, namun dalam pandangan ilmu Geografi Urbanisasi adalah sebagai suatu proses pengkotaan, baik dari morfologinya maupun dari penduduknya. Mc. Gee (1997: 12) menyatakan bahwa proses perkembangan dan urbanisasi kota-kota di Indonesia (terutama di Pulau Jawa) ditandai oleh adanya restrukturisasi internal kota-kota besarnya. Kota-kota di Indonesia pada beberapa dekade mendatang cenderung akan terus berkembang baik secara demografis, fisik, maupun spasial. Fenomena menyusutnya penduduk perdesaan dalam dua dekade yang lalu akibat adanya migrasi besar-besaran penduduk perdesaan. Hal ini memberi

indikasi bahwa kota-kota di Indonesia akan berkembang pesat baik secara demografis maupun spasial di masa mendatang.

Pokok persoalan yang terdapat di daerah *urban fringe* pada dasarnya dipicu oleh proses transformasi spasial dan sosial akibat perkembangan daerah urban yang sangat intensif. Dari kecenderungan di atas maka salah satu arah perkembangan kota yang perlu dicermati adalah perkembangan spasial yang berdampak pada perkembangan sosial ekonomi penduduk pinggiran kota.

Daerah kekotaan adalah daerah yang bentuk pemanfaatannya berorientasi kekotaan/non pertanian sedangkan daerah kedesaan adalah daerah yang berorientasi pemanfaatannya untuk kegiatan pertanian. Bentuk pemanfaatan lahan yang mengalami perubahan cukup besar di daerah pinggiran kota selain bentuk pemanfaatan lahan pertanian adalah lahan permukiman. Banyak pendatang baru baik dari bagian dalam kota maupun dari daerah lain menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah maupun kepadatan baik penduduk maupun perumahan. Sebelum adanya pengaruh dari meluasnya pengaruh kota baik secara fisik maupun non fisik, pada mulanya daerah pinggiran kota merupakan daerah yang dihuni oleh penduduk yang sebagian besar mempunyai kegiatan di bidang pertanian. Oleh karena kegiatan penduduknya sebagian besar berorientasi pertanian maka permukimannya terstruktur sedemikian rupa dalam lingkup kegiatan pertanian pula. Karakteristik ini pada beberapa bagian daerah pinggiran kota masih dapat ditemukan, antara lain adanya kandang – kandang ternak di samping rumah, halaman yang luas untuk menjemur padi, serta ruang – ruang tertentu di dalam rumah tempat menyimpan bahan makan

(lumbung). Semakin banyaknya pengaruh peri kehidupan kota yang masuk ke daerah kedesaan ini lambat laun peri kehidupan kedesaan akan semakin pudar. Secara teoritis, makin jauh dari daerah kekotaan yang terbangun, makin pudar pula kenampakan kekotaan yang dapat dikenali baik di dalam permukiman maupun pada bentuk – bentuk pemanfaatan yang lain. Untuk lahan pertanian, misalnya, semakin mendekati batas kekotaan secara fisik semakin pudar keberadaannya dan semakin menjauhi daerah kekotaan yang terbangun semakin kentara keberadaannya. Hal ini sejalan dengan konsep *distances decay principal*.

2. Kaidah Daerah Pinggiran Perkotaan

Dalam upaya untuk menjelaskan struktrur internal daerah pinggiran kota, Russwurm (1975) dalam Giyarsih (2009:45) mengemukakan beberapa jalur konsentris dengan karateristik kenampakan tertentu yang tertuang pada teori kota regional. Ulasannya mengacu pada konsep *distances decay principal* yang menjelaskan bahwa semakin menjauhi daerah kekotaan terbangun semakin pudar pula ciri – ciri kekotaannya. Dalam teori dikemukakan tiga jalur konsentris mulai daerah kekotaan yang terbangun sampai ke daerah yang berkenampakan kedesaan sesungguhnya. Ketiga jalur konsentris yang terletak di daerah pinggiran kota ini adalah [1] jalur konsentris bagian dalam [*inner fringe*]; [2] jalur konsentris bagian luarnya [*outer fringe*]; dan [3] jalur konsentris bayangan kekotaan [*urban shadow fringe*]. Dalam menjelaskan karakteristik masing – masing, Russwurm [1975] dalam

Giyarsih (2009:48) hanya mengacu pada kondisi bentuk pemanfaatan lahannya semata.

Jalur konsentris bagian dalam merupakan jalur yang berbatasan langsung dengan daerah kekotaan yang terbangun [*contiguous urban built-up land*] dan mempunyai ciri khas bentuk pemanfaatan kekotaan yang lebih dominan dibanding dengan bentuk pemanfaatan lahan kedesaan yang tersisa. Jalur konsentris terluar ditandai oleh dominasi pemanfaatan lahan kedesaan dibandingkan dengan pemanfaatan lahan kekotaan yang mulai menginfiltrasi daerah ini. Menurut Russwurm [1975] dalam Giyarsih (2009:49) kedua jalur ini. Sebagai *urban fringe* yaitu suatu jalur yang mempunyai percampuran pemanfaatan lahan kekotaan dan kedesaan dalam ekspresi ruang yang cukup mudah dapat dikenali. Jalur konsentrasi bayangan kekotaan [*urban shadow fringe*] merupakan suatu jalur di mana pengaruh kekotaan mulai dapat dirasakan dengan intensitas yang sangat sedikit dan masih sulit untuk dikenali secara keruangan. Secara konseptual, setelah jalur ketiga ini ditemui suatu daerah yang betul – betul bersifat kedesaan [*rural areas*]. Walaupun penjelasan yang dikemukakan masih kurang begitu jelas dan bersifat teoritis namun idenya mengemukakan gradasi kenampakan pengaruh kekotaan dalam wujud bentuk – bentuk pemanfaatan lahan dapat ditemui hampir di semua kota baik di negara maju maupun di negara berkembang. Istilah *urban fringe* yang meliputi *inner fringe* dan *outer fringe* ini oleh Pryor [1968] dalam Isnaeni (1997:45) disebut *rural-urban fringe*. Menurut Pryor [1968] dalam Isnaeni (1997:45) istilah *inner fringe* yang

dikemukakan oleh Russwurm [1975] dalam Giyarsih (2009:49) dipadankan dengan istilah *urban fringe*, sedangkan istilah *outer fringe* yang dikemukakan oleh Russwurm [1975] dalam Giyarsih (2009:51) dipadankan dengan istilah *rural fringe*. Penjelasan yang dikemukakan baik oleh Ruswurm [1975] dalam Giyarsih (2009:49) maupun Pryor [1968] dalam Isnaeni (1997:47) mengenai karakteristik – karakteristik masing – masing jalur tidak jauh berbeda.

Penelitian mengenai evolusi permukiman dilakukan oleh Mc. Gee [1997:58] di daerah pinggiran kota Hyderabad, india. Penemuannya sangat menarik untuk dikemukakan dalam paragraf ini karena di samping kota Hyderabad adalah salah satu kota di negara berkembang, kesepadanan gejalanya dengan apa yang terjadi di pinggiran kota di indonesia pada umumnya dan pinggiran kota Surakarta pada khususnya cukup besar permukiman di daerah pinggiran kota Hyderabad mengalami tiga macam tingkatan perkembangan yang dalam perspektif vertikal dan horisontal masih dapat ditemui. Dalam perspektif vertikal terlihat adanya perkembangan tingkat kekotaannya sedang perspektif horisontal menunjukkan jarak terhadap daerah kekotaan yang telah terbangun. Makin mendekati lokasi daerah kekotaan yang telah terbangun makin nampak kekotaannya dan begitu pula sebaliknya. Ketiga tingkatan perkembangan ini adalah [1] permukiman sub-urban [*sub urban settlements*]; [2] daerah telah terurbanisasi [*urbanized settlements*]; dan [3] permukiman yang sedang mengalami urbanisasi [*urbanizing settlements*]. Permukiman sub urban adalah tingkatan perkembangan permukiman yang paling terakhir menjadi sifat sepenuhnya

kekotaan. Kenampakan morfologikal kekotaannya nyaris mendekati kenampakan kekotaan yang sesungguhnya dan kenampakan kedesaannya nyaris musnah. Kegiatan pertanian tidak lagi menjadi kegiatan utama penduduknya walaupun masih ada penduduk yang bertani, namun kegiatan sekunder dan tersier mulai mendominasi kegiatan penduduknya dan kegiatan ekonomi daerah ini betul – betul terintegrasi dengan kegiatan kekotaannya.

Permukiman terurbanisasi adalah tingkatan perkembangan permukiman yang paling genting keadaannya. Tingkatan ini ditandai oleh kegiatan pertanian yang sangat sensitif, sangat spesifik dan selalu terorientasi pada pasar [proses intensifikasi dan komersialisasi pertanian sangat mendominasi bentuk – bentuk lahan pertaniannya]. Penduduknya tidak sepenuhnya menggantungkan penghasilannya dari kegiatan pertanian, namun mencari penghasilan tambahan di luar bidang pertanian baik di bagian dalam kota karena lokasi daerah ini tidak jauh dari kota maupun industri yang mulai bermunculan di daerah pinggira kota. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa penduduk cenderung memiliki penghasilan lebih dari satu, di satu sisi masih ada komitmennya di bidang pertanian. Menurut Mc. Gee [1997:58], hal tersebutlah yang menjadi penyebab mengapa di daerah ini gejala spekulasi lahan dan penjualan lahan tidak begitu banyak. Memang ada beberapa kasus penjualan lahan di daerah ini, namun berdasarkan penelitiannya mereka masih tetap bertempat tinggal di daerah tersebut dan hasil penjualan lahannya dibelikan lahan baru yang tempatnya lebih jauh lagi sehingga mereka memperoleh lahan yang lebih luas. Di

samping sistem pertanian komersial, di daerah ini merebak pula kegiatan non pertanian yang dilaksanakan oleh penduduk setempat. Diversifikasi kegiatan ekonomi merupakan salah satu fenomena yang mencolok di daerah tersebut. Gerakan sentrifugal fungsi industrial, komersial dan jasa ke daerah ini telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakatnya.

Permukiman yang sedang mengalami urbanisasi merupakan tingkatan awal menuju ke sifat kota yang sesungguhnya. Pada tahapan ini, kegiatan pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk. Walaupun demikian mulai terlihat gejala perubahan orientasi kegiatan pertanian dari sifat yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga semata [*purely household-oriented activity*] menjadi kegiatan pertanian yang berorientasi kebutuhan pasar kota [*city market-oriented activity*]. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Bryant [1970] dalam Yunus (2001:39) bahwa meningkatnya permintaan barang produksi pertanian di kota [sebagai salah satu perangsang timbulnya interaksi daerah pinggiran kota dengan kota / *urban-based stimuli interaction*] telah mengakibatkan meningkatnya pemasaran produksi pertanian di kota dengan cara mengubah sistem pertaniannya. Kedekatan letaknya dengan kota, telah mendorong penduduk yang tidak mempunyai sama sekali atau hanya memiliki sedikit sekali lahan pertanian untuk bekerja di luar bidang pertanian di kota, khususnya pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan khusus [*unskilled manual job*]. Sedikitnya kesempatan kerja di desa asalnya [dianggap sebagai salah satu pendorong dalam model Colby] dan penghasilan yang tinggi di kota [dianggap

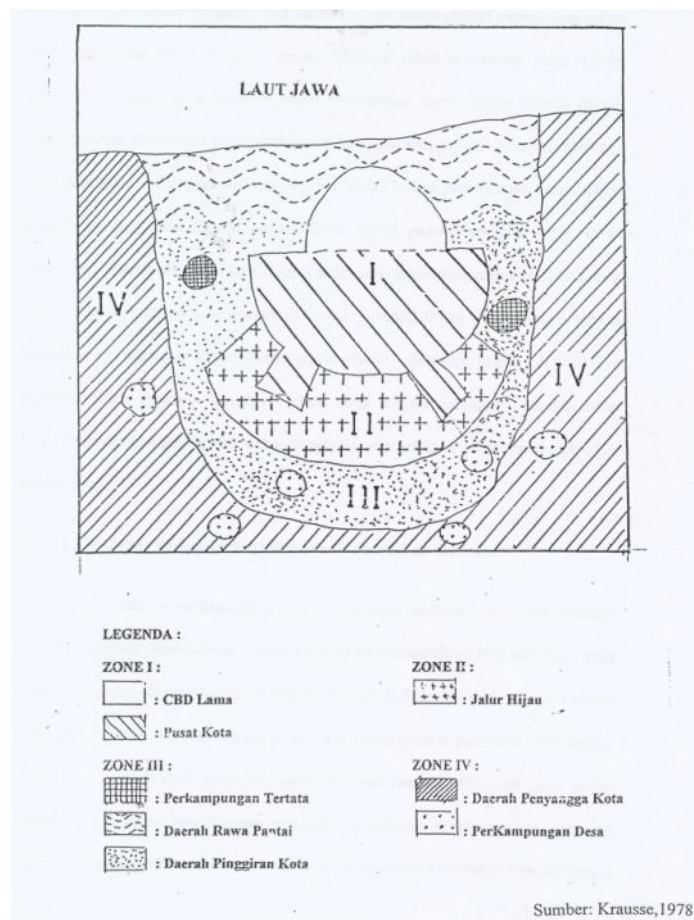
sebagai salah satu kekuatan penarik] merupakan kekuatan sentripetal yang teraktualiasi.

Studi lain mengenai daerah di pinggiran kota yang menarik dikemukakan oleh Krausse [1978:42]. Studinya secara khusus membahas permukiman kampung yang ada di kota Jakarta. Walaupun studinya dilaksanakan 19 tahun yang lampau, pemerianannya tetap relevan bukan dalam arti lokasinya namun dalam arti pola dan proses berlangsung, karena pada hakekatnya zonasi bentuk permukiman hanya mengalami pergeseran saja dalam hal lokasi. Apabila dalam waktu sebelumnya sesuatu lokasi tertentu masih berada dalam daerah pinggiran kota maka beberapa tahun kemudian akan menjadi daerah terbangun dan daerah yang semula merupakan daerah pertanian pada gilirannya akan menjadi daerah pinggiran kota. Kosep ini sejalan dengan *wave analog theory* yang kebenarannya telah teruji pada beberapa kota baik di negara maju dan berkembang. Dalam studinya, Krausse [1978:54] menemukan bahwa permukiman kampung di daerah pinggiran kota berbeda dengan pola permukiman kampung yang terletak di bagian dalam kota. Permukiman kampung yang dimaksud dalam penelitiannya adalah suatu bentuk permukiman yang kebanyakan dihuni oleh penduduk yang berpenghasilan rendah, dengan berbagai fasilitas yang minimal serta kualitas bangunan yang sedang sampai substandar.

Dari bagian kota sampai kepinggirannya, kota Jakarta memiliki empat zona permukiman kampung yang berbeda dalam artian kondisi tapak [*site condition*], kepadatan [*Density*], fasilitas [*facilities*], dan perumahan [*Housing*]. Ulasan yang

dikemukakan pada bagian ini hanya permukiman yang ada di bagian pingiran kota Jakarta saja. Pada umumnya, permukiman kampung daerah pingiran kota Jakarta ditandai oleh [1] banyak migran yang bertempat tinggal belum lama [*recent migran*], [2] kurang tertibnya kontrol dan perencanaan lahan, [3] harga lahan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bagian dalam kota, [4] material bangunan kurang baik, serta [5] kurangnya fasilitas permukiman. Di daerah pingiran kota sendiri ada tiga macam permukiman, yaitu [1] permukiman kampung yang terencana [*planned kampungs*], [2] permukiman kampung yang masih bersifat kedesaan [*the already existing rural kampungs*] dan [3] permukiman kampung liar [*the peripheral squater kampungs*]. Secara rinci, persebaran ketiga macam permukiman kampung ini tidak dikemukakan oleh Krausse (1978:62) dan hal ini perlu dibahas lebih lanjut karena kondisi keruangan dan lingkungan daerah pingiran kota Jakarta sendiri menunjukkan variasi yang cukup besar. Demikian pula mengenai proses formatif tidak disinggung sama sekali. Berdasarkan model yang disajikan dapat memberikan kesan seluruh daerah pingiran kota didominasi oleh permukiman kampung liar, padahal kenyataannya tidak demikian. Permukiman kampung liar adalah permukiman yang berada pada lahan yang tidak legal [Drakakish-Smith, 1980:46], pada sebagian besar lahan yang berada di daerah pingiran kota Jakarta sudah jelas kepemilikannya walaupun secara hukum adat saja dan pada kenyataannya daerah ini sudah dihuni oleh penduduk selama beratus tahun walaupun kepadatannya masih rendah. Beberapa bagian di antaranya memang tidak terurus, khususnya lahan milik negara sehingga

memungkinkan timbulnya permukiman liar dan elaborasi penjelasan keruangannya belum diungkapkan oleh Krausse (1978:62).



Gambar 1. Zone Permukiman Kampung

Semua kota, secara keruangan selalu mempunyai tendensi meluas dan beberapa kekuatan menjadi penyebabnya. Sargent [1976] dalam Giyarsih (2009:41) mengidentifikasi *lima kekuatan* yang menyebabkan terjadinya pemekaran kota secara fisik. *Kekuatan yang pertama* adalah peningkatan jumlah penduduk yang besar yaitu meningkatnya penduduk kota sebagai akibat dari penambahan penduduk alami maupun migrasi. *Kekuatan yang kedua* adalah peningkatan kesejahteraan penduduk, khususnya penghasilannya, sehingga mendorong penduduk yang semula tinggal di bagian dalam kota untuk mencari tempat-tempat baru di daerah pinggiran kota [lihat model Colby [1933] *Dynamic Forces Theory* dan model Turner [1970] mengenai *Residential Mobility Theory*]. *Kekuatan yang ketiga* peningkatan pelayanan transportasi karena kemajuan teknologi di bidang ini, sehingga meningkatkan mobilitas penduduk baik dalam hal kualitas, kuantitas dan keruangan. *Kekuatan yang keempat* khususnya berlaku di daerah maju yaitu gejala menurunnya peranan pusat kota sebagai pusat kegiatan sehingga mendorong fungsi – fungsi kekotaaan untuk memindahkan kegiatannya ke daerah pinggiran kota. *Kekuatan yang kelima* peningkatan peranan para pembangun [*developers*] dalam menyediakan dan membangun lokasi – lokasi baru untuk kompleks permukiman di daerah pinggiran kota dalam jumlah yang besar.

Meluasnya pemanfaatan lahan kekotaaan di daerah pinggiran kota, dapat terjadi secara kesinambungan dengan daerah kekotaannya yang sudah terbangun [*The already established urban built-up land*] dan dapat pula terjadi tidak secara

berkesinambungan namun melompat – lompat. Cara perluasan tipe pertama disebut akresi [*accretion expansion*] dan cara yang kedua disebut sebagai poli nuklir [*polynuclear expansion*] [Garnier dan chabot, 1971] dalam Yunus (2001:52). Sementara itu, cara perluasan pemanfaatan lahan kota yang kedua tersebut menurut Doumichel [1975] dalam Yunus (2001:55) tidak lain merupakan manifestasi pertumbuhan kota melalui proses perkembangan berbagai tipe pemanfaatan lahan yang terpecah – pecah di daerah pinggiran kota yang kemudian diikuti oleh proses pengisian [*infilling process*] daerah antara [*interstitial areas*] dengan bentuk pemanfaatan lahan yang sama sampai akhirnya menjadi bentuk yang kompak. Ekspresi keruangan perluasan bentuk pemanfaatan lahan kota ke daerah pinggiran kota dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu [1] perluasan konsentris [*concentric expansion*]; [2] perluasan memanjang [*linear / axial / ribbon elongated expansion*]; [3] perluasan melompat – lompat [*checker board / leap frog expansion*] dan [4] perluasan dengan cara pengisian ke dalam [*infilling expansion*]. Keempat bentuk perluasan kenampakan kota di daerah pinggiran kota tersebut juga disebut dengan proses penjarangan kenampakan kota [*urban sprawl*] [Murphy, 1974] dalam Yunus (1985:62) proses perluasan kenampakan kota yang terjadi di daerah pinggiran kota tersebut selalu teraktualisasi dalam proses konservasi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Perluasan bentuk pemanfaatan kota yang pertama mempunyai sifat yang lambat dengan intensitas pertumbuhan yang rendah [Murphy, 1974] dalam Yunus

(2000:46). Dibandingkan dengan tipe – tipe lain, tipe yang pertama ini dianggap paling lambat [*least offensive*] karena sebaran keruangnya merata di semua sisi – sisi luar daerah kota yang telah terbangun [*contiguous pattern of development*]. Perluasan bentuk pemanfaatan lahan kota tipe kedua akan membentuk segmen – segmen tertentu secara kompak pada bagian – bagian tertentu di sepanjang jalur transportasi. Bagian – bagian yang terletak di antara jalur – jalur transportasi tidak banyak mengalami perubahan sehingga daerah – daerah ini [*interstitial areas*] masih merupakan bentuk pemanfaatan lahan pertanian. Oleh karena dampak keruangan yang ditimbulkan pada aspek kehidupan yang ada menciptakan sektor – sektor pendidikan, penghasilan dan mata pencaharian yang berbeda – beda, oleh Watson [1974:67] tipe perkembangan kenampakan kota yang kedua ini juga disebut sebagai perkembangan sektoral [*sectoral development*]. Perluasan bentuk pemanfaatan lahan kota yang ketiga lebih dikenal sebagai perkembangan lompat katak. Perluasan kenampakan kota yang terjadi di daerah pinggiran kota tidak menyatu dengan kenampakan kota yang telah terbangun namun secara sporadis terpisah dalam unit yang terpisah – pisah pada lahan pertanian. Beberapa pakar menganggap bahwa tipe ini mempunyai tipe yang paling ofensif ke lahan pertanian karena mengakibatkan hilangnya lahan pertanian secara cepat. Perluasan kenampakan kotanya terjadi pada daerah – daerah antara yang belum terbangun yang berfungsi sebagai penyambung antar bagian – bagian yang sudah terbangun yang akhirnya akan merupakan perluasan dari daerah terbangun yang ada. Oleh karena manifestasi bentuk perkembangan ke empat ini merupakan bentuk lain daripada

bentuk lompat katak, oleh beberapa ahli dianggap bukan sebagai tipe perkembangan yang baru [Murphy, 1974] dalam Yunus (2000:43).

Yeh [1979:33] di dalam penelitiannya mengenai perkembangan kota Bangalore, India menemukan beberapa gejala yang menarik. Penelitian dilaksanakan dengan membandingkan data perkembangan kota mulai tahun 1537. ketersediaan data sangat menunjang penelitiannya sehingga beberapa tahapan dapat dikenali dengan baik. Ada tiga tahapan perembetan kenampakan kekotaan ke daerah pinggiran kota yang masing – masing tahapan menunjukkan karakteristik yang berbeda – beda. Tahap pertama *residential leap-frog development*, tahap kedua adalah *industrial leap-frog development*, dan tahap ketiga adalah *institutional leap-frog development*. Sementara itu proses pengisian daerah yang masih kosong oleh permukiman terus berlangsung dan perkembangan perdagangan terjadi di sepanjang jalur transportasi.

Secara garis besar dapat diintisarikan bahwa menurut Yeh [1979:33] ada empat faktor utama yang mempengaruhi perkembangan lahan kekotaan di daerah pinggiran kota Bangalore, yaitu [1] adanya jalur transportasi yang memadai dan hal ini telah mendorong tumbuhnya kompleks industri di sepanjang jalur tersebut; [2] proksimitas dengan pusat pertumbuhan; [3] preferensi penduduk maupun fungsi – fungsi untuk memilih lokasi di daerah yang tidak terganggu oleh berbagai macam kepadatan baik penduduk, permukiman maupun lalu lintas dan [4] ketersediaan lahan yang masih leluasa di pinggiran kota. Pertumbuhan industri dijumpai pada lokasi –

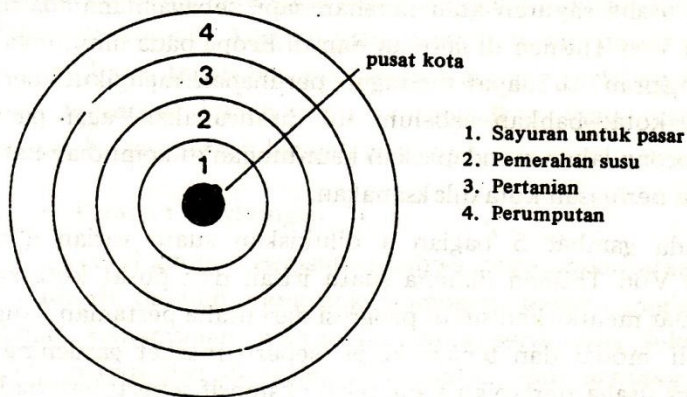
lokasi yang terisolasi dan sepanjang koridor. Pertumbuhan ini memberikan indikasi adanya pertumbuhan kenampakan kekotaan yang tidak teratur dan melompat – lompat. Demikian pula halnya dengan institusi baik pemerintah maupun swasta, permukiman dan fungsi – fungsi komersial yang ada. Secara keseluruhan terkesan kesemrawutan perkembangan kenampakan kekotaan di daerah pinggiran kota Bangalore.

Penelitian Hall [1985] dalam Yunus (2007:36) di kota San Jose, Costa Rica menunjukkan adanya kompetisi yang menarik antara lahan kekotaan dengan lahan pertanian. Sebagaimana kota di negara yang sedang berkembang, kota San Jose juga mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Menurut Hall [1985] dalam Yunus (2007:36) perkembangan penduduk yang cepat ini telah membawa dua macam konsekuensi keruangan yang menarik, yaitu perubahan bagian dalam kota secara morfologikal dan perluasan kenampakan kekotaan ke arah daerah pinggiran kota. Pada kenyataannya, peralihan kenampakan kekotaan ke kenampakan kedesaan bersifat sangat gradual sehingga sangat sulit untuk dapat dikenali dengan batas kekotaannya. Sepanjang jalan yang menghubungkan kota San Jose dengan kota lain kebanyakan didominasi oleh perkembangan kenampakan kota memanjang. Keadaan pola pemanfaatan lahan di daerah pinggiran kota San Jose sangat semrawut, karena kurang efektifnya aplikasi perencanaan pemanfaatan lahan dan perencanaan wilayah yang ada untuk mengatur perkembangan pemanfaatan lahannya. Gejala pencaplokan lahan pertanian produktif oleh lahan perkotaan merupakan gejala yang sangat umum

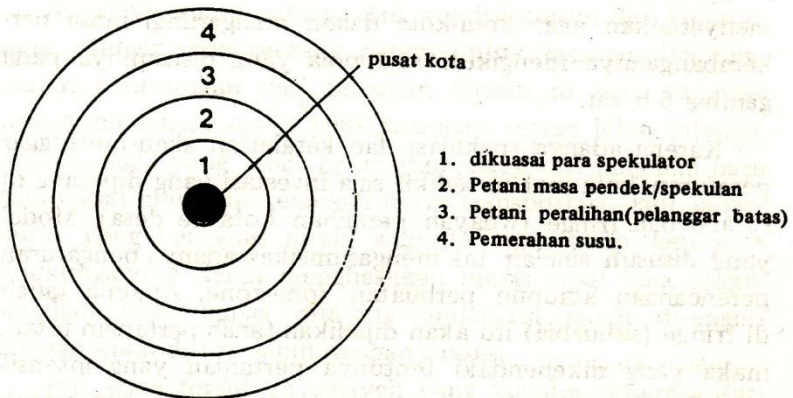
ditemui di daerah pinggiran kotanya. Bahkan beberapa institusi pemerintah justru memelopori konversi lahan lahan menjadi lahan kekotaan. Rupa – rupanya apa yang dikemukakan oleh Hall [1985] dalam Yunus (2007:36) mempunyai banyak kemiripan dengan kondisi dan gejala yang terdapat di daerah pinggiran kota di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yaitu [1] peralihan daerah kekotaan ke kedesaan yang kabur; [2] adanya gejala konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian yang sangat banyak; [3] banyaknya instansi pemerintah yang justru memelopori konversi lahan pertanian subur menjadi lahan non pertanian; [4] dominasi perkembangan memanjang di sepanjang jalur transportasi dan [5] kesemrawutan pemanfaatan lahan di daerah pinggiran kota karena kurang efektifnya perangkat perencanaan pemanfaatan lahan yang ada.

3. Dua Model Tata Guna Lahan di Pinggiran Kota

a. Model Von Thunen dimodifikasi



b. Model Sinclair



(Short, h. 189)

Gambar 2 . Dua Model Penggunaan Tata Guna Lahan di Pinggiran Kota

3.1. Modifikasi Model Von Thunen dan Model Sinclair

Dalam abad ke-20 setelah perang dunia kedua, di Eropa misalnya Inggris, pinggiran kota tak lagi dimanfaatkan untuk usaha sayuran atau perahan sapi sebagaimana ada zaman Von Thunen di Jerman dan Eropa pada umumnya. Di pinggiran itu dapat dibangun perubahan mengikuti perluasan kota, bahkan sebelum itu direncanakan agar para pemborong lahan mendapatkan keuntungan dikemudian hari apabila perluasan kota dilaksanakan.

Pada gambar a dilukiskan suatu varian dari model Von Thunen dimana suatu irisan dari pusat kota ke arah luar melukiskan suatu progresi dari usaha pertanian yang intensif modal dan tenaga kerja ke jenis usaha pertanian yang telah ekstensif seperti beternak sapi atau bertani gandum. Dasar pokok dari model tersebut adalah keuntungan lokasional dalam arti dekatnya dari pinggiran kota-kota di Amerika Serikat, maka Sinclair (1967) dalam Turner (1982:56) menyarankan agar kota-kota dalam menghadapi masa perkembangan mengikuti saja pola yang disusunnya seperti pada gambar b.

Dengan adanya spekulasi dan ketakutan akan melanggar peraturan kota yang memaknai sedikit saja investasi yang dipasang di *rural-urban fringe* (wilayah peralihan kota ke desa). Model yang disusun Sinclair tidak mengasumsikan adanya peraturan di fringe (suburban) itu akan dijadikan tanah pertanian tetap, maka yang dikehendaki tentunya pertanian yang intensif modal. Jika wilayah yang bersangkutan dizona untuk pembangunan perumahan maka orang takut akan terjadi konversi (pembalikan) fungsi lahannya dan segala rencana macet.

Yeh (1979:65) menunjukkan bahwa di Inggris perencanaan tata guna lahan dalam rangka pembangunan wilayah, efeknya dapat menguntungkan, yakni : memperlambat pelaksanaan konversi tata guna lahan pedesaan menjadi tata guna lahan perkotaan. Adapun yang negatif yakni : menghambat melonjaknya harga lahan dan pemilikan lain yang berkaitan dengan itu, misalnya harus ditinggalkan atau dirombak sesuai dengan perkembangan wilayah.

4. Kajian Tentang Struktur Intern Perkotaan

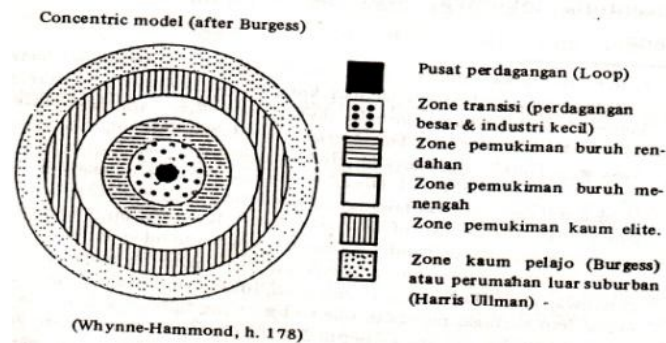
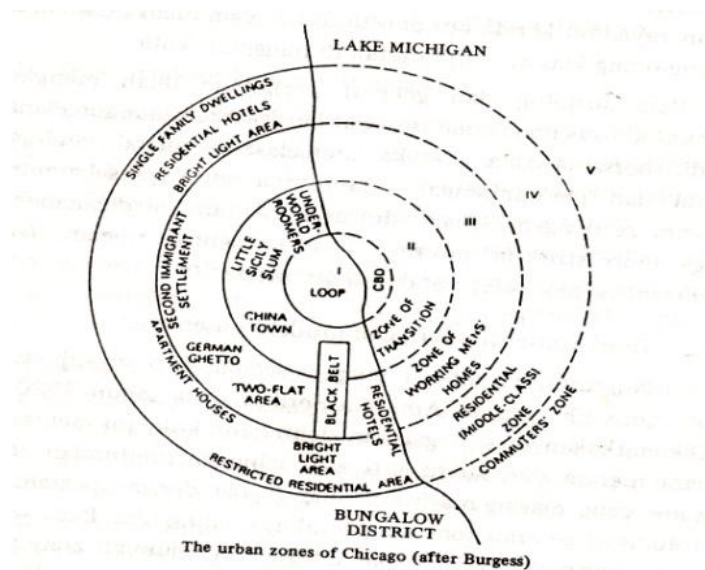
Menurut Daljoeni (1992:148) meskipun struktur kota tampak serba kacau, tetapi jika dipelajari dengan seksama ternyata memiliki keberaturan tertentu; keberaturan ini dapat ditemukan pada kota setempat atau negeri lain pula. Bentuknya ada yang tergolong segi empat panjang, bujur sangkar, bulat, lonjong, bahkan ada yang seperti bintang dengan ujung-ujung yang mencuat ke luar mengikuti jalur jalan raya yang berpangkal di pusat kota.

Demikian pula halnya dengan struktur intern perkotaan yang sifatnya tak sembarangan. Pada umumnya hal ini dimungkinkan untuk membedakan kelompok-kelompok bangunan dalam kota berdasarkan tata guna lahannya. Gedung-gedung tersebut berlainan luasnya, bentuknya serta fungsinya; adapun persebarannya mewujudkan kawasan intern kota yang khas, terdiri atas zone-zone yang masing-masing zone memiliki corak berdasarkan material bangunannya serta watak manusia penghuninya, sehingga kawasan intern kota yang satu dengan lainnya akan berbeda, dengan menelaah kota sekilas pintas atau berjalan-jalan keliling kota, akan terlihat adanya zone-zone intern perkotaan itu. Ada kawasan pusat perbelanjaan, perkantoran, gedung pemerintahan dan tempat hiburan, dan kesemuanya menempati kota bagian pusat. Selanjutnya ada kawasan perindustrian yang selalu dekat dengan jaringan jalan raya, rel kereta api dengan derajat keterjangkauan yang sangat tinggi, sehingga akan muncul perumahan orang-orang kelas atas yang terletak di pinggiran kota.

Para sosiolog dan geografer perkotaan telah mengkaji secara khusus zone-zone tersebut berdasarkan tata guna lahan, selanjutnya dijelaskan sejarah asal-usul kota dan perkembangan serta persebarannya secara keruangan. Ada tiga teori struktur intern perkotaan yang menjadi pendahulu dalam kajian ini, yakni: teori konsentris, teori sektoral dan teori inti-ganda. (Daldjoeni 1992:149).

4.1. Teori Konsentris Burgess (model konsentris)

Teori yang pertama adalah teori konsentris yang dikemukakan oleh Burgess, teori ini muncul setelah meneliti dan mengkaji struktur kota Chicago di Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Gagasan yang dikemukakan yakni adanya perluasan kota secara merata dari suatu inti asli, sehingga tumbuhlah zone-zone yang masing-masing meluas sejajar dengan pertahapan kolonisasi ke arah zone yang letaknya paling luar.



Gambar 3: Bagan Teori Konsentris dari Burgess.

Gambar di atas memperlihatkan struktur tata guna lahan dari kota Chicago menurut teori Burgess. Di pusat kota (I) tersebut, terdapat *CBD (Central Business District)* yang di Chicago sebutannya *The Loop*, adapun fungsinya sebagai fokus kehidupan perdagangan, kemasyarakatan dan perekonomian. Zone yang kedua adalah *transitional zone* (zone peralihan) yang berupa kawasan perindustrian yang diselingi oleh rumah-rumah pribadi yang kuno. Rumah-rumah ini kemudian banyak di antaranya telah diubah menjadi perkantoran dan pertokoan atau dibagi-bagi menjadi kawasan perumahan berukuran relatif sempit. Zone ini setelah mengalami proses penuaan bangunannya nampak kusam karena rusak, kemudian dimanfaatkan oleh para imigran baru sebagai daerah hunian sementara, yaitu sebagai pemukiman kaum miskin, karena kenampakkannya yang tidak teratur, semrawut, sanitasi yang sangat buruk, fasilitas umum yang sudah tidak berfungsi kembali, maka daerah ini dikenal dengan daerah permukiman kumuh, di daerah ini pula biasanya berpusat pula gejala kenakalan remaja, kejahatan dan pelacuran.

Zone berikut (Zone III), adalah kawasan perumahan kaum buruh, penduduknya banyak yang berasal dari zone peralihan di atas termasuk kaum imigran. Banyak orang yang lama bertempat tinggal di daerah tersebut bahkan sejak kelahiran mereka, dan mereka tidak mungkin lagi tinggal di zone yang lebih luar karena mahalnya biaya transportasi bagi mereka yang tempat

tinggalnya jauh dari tempat mereka bekerja.

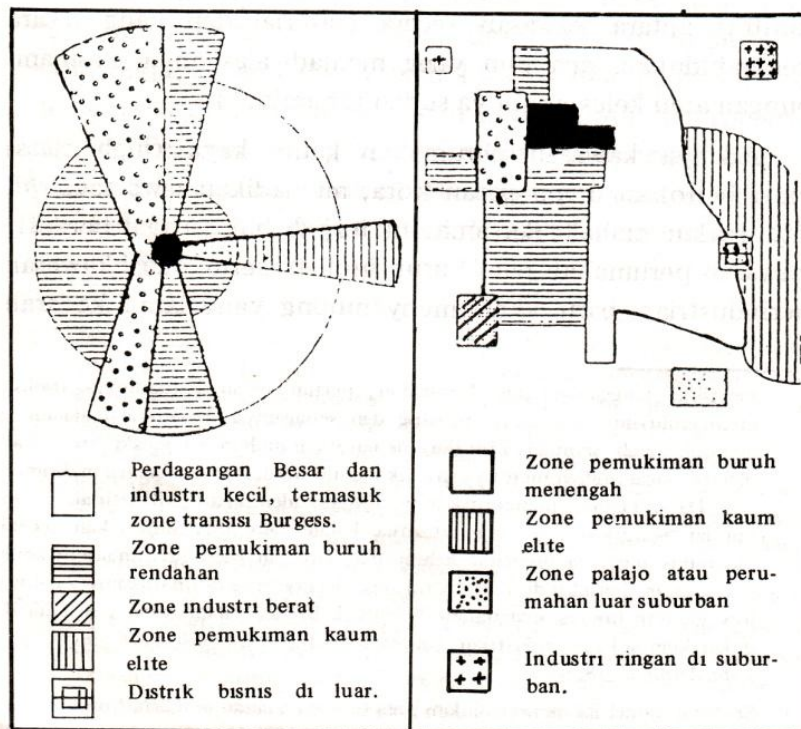
Adapun zone (IV) berisi penghuni yang tergolong kelas menengah, perumahan mereka tidak lagi berhimpitan dan satu rumah berisi orang tunggal saja. Pada zone ini terdapat juga perumahan berklas lebih tinggi. Kemudian zone V (terluar) disebut *commuters zone* yakni tempat tinggal pada penglaju. Alamnya masih terbuka luas; perumahan-perumahan banyak diselingi suasana pedesaan dan kawasan orang kaya itu berfungsi sebagai kota kecil untuk beristirahat atau tidur pada malam hari (*dormitory towns*).

Perlu diingat bahwa teori konsentris merupakan model yang ideal yang hanya dapat diterapkan di negara Barat yang maju; ditambahkan oleh Burgess demikian: lokasinya di kawasan di mana absen faktor-faktor 'opposing' (pelawan) seperti topografi yang menghambat transportasi dan rute yang tidak menguntungkan bagi komunikasi. Dalam kenyataannya zone-zone konsentris tidak dapat ditemukan dalam kenyataan yang sebenarnya

4. 2. Teori model Sektoral dari Homer Hoyt

Gagasan bahwa pertumbuhan kota itu merupakan proses yang lebih mengendapkan bentuk-bentuk sektoral daripada bentuk zonal (gelang-gelang), pertama kali muncul dan dikembangkan dalam dasa warsa 30-an abad ini. Pencetusnya adalah Homer Hoyt, yang semula juga belajar pada Burgess di Universitas Chicago. Sambil menerima pendapat bahwa setiap kota itu

bercirikan CBD pada bagian pusatnya, Hoyt mengatakan bahwa pengelompokan tata guna lahan di kota itu menyebar dari pusat ke arah luar berupa *wedges* (atau sektor, sebutannya) yang bangunnya seperti irisan roti tart (cake). (Daldjoeni, 1992:151).



Gambar 4.:

-Bagan

ModelSektoral(
Homer Hyot)

- Bagan Model
TeoriInti Ganda
(Harris
Ullman)

Gambar 4. memperlihatkan adanya perbedaan antara kawasan baik secara material dan maupun secara kependudukan. Adanya kawasan perumahan kaum kaya (high class) yang berlokasi di pinggiran kota, menjadikan sewa tanah di daerah sekitar perumahan makin mahal. Hal ini terjadi kawasan perumahan para buruh industri serta lokasi kawasan perindustrian baru akan menyambung dengan kawasan perindustrian yang lama, sehingga cara seperti ini akan menambah beragamnya tata guna lahan untuk dilestarikan melalui proses ekspansi kota. Hal

ini disebabkan oleh sifat manusia dan latar belakang ekonomi. Penyebab yang lain karena dilihat dari segi geografisnya baik kondisi fisik dan dari situasi kota yang bersangkutan, serta kemudahan dari bidang transportasi (aksesibilitas). Suatu dataran rendah misalnya menyajikan kemungkinan untuk munculnya jalan raya, jalan kereta api. Faktor-faktor tersebut merupakan daya tarik bagi para penanam modal untuk mendirikan kompleks industri, akan tetapi berbeda dengan suatu daerah yang topografinya berbukit-bukit dapat menyebabkan munculnya pembangunan perumahan yang berjajar secara memanjang.

4.3. Teori Inti Ganda dari Harris dan Ullman

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Harris dan Ullman tahun 1945. teori inti ganda ini sangat berbeda dari teori yang terdahulu, perbedaan dari kedua teori terdahulu adalah adanya pusat-pusat pertumbuhan dalam proses perkembangan kota. Tiap inti kota di sekelilingnya muncul struktur perkotaan yang memiliki sel-sel pertumbuhan yang cukup lengkap. Teori inti ganda pada dasarnya merupakan gejala lanjut dari kota yang berpola sektoral, di dalam bagan 3.2 (sebelah kanan) terlihat bahwa zone permukiman untuk para buruh kelas menengah menempel dekat pada zone industri di suburban dan juga menempel pada zone perdagangan dan pergudangan. (Daldjoeni, 1992:154)

Dari ketiga tersebut di atas memperlihatkan bahwa industri berat dan manufaktur selalu berada di daerah suburban, ciri dari daerah suburban adalah daerah

yang tidak terlalu jauh dari pusat kota dan mencirikan kenampakan morfologi daerah rural. Dengan demikian pada daerah suburban masih banyak dijumpai lahan-lahan luas dengan harga yang relatif masih murah namun dengan derajat keterjangkauan yang sangat tinggi atau dengan kata lain daerah ini banyak dijumpai jaringan jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Tidak dipungkiri bahwasanya industri-industri yang bermunculan di daerah suburban akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para urbanit untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Kedatangan para urbanit yang berbondong-bondong ini tidak dilengkapi dengan keterampilan yang memadai serta tingkat pendidikan formal yang cukup. Akibatnya para urbanit ini akan mendapatkan pekerjaan di sektor industri hanya sebagai buruh industri dengan gaji yang sangat minim.

Seiring dengan berjalannya waktu maka para urbanit memerlukan tempat untuk berteduh yakni rumah, untuk meringankan biaya transportasi maka dicari tempat tinggal yang berdekatan dengan tempat bekerja, sehingga muncullah permukiman-permukiman di sekitar daerah industri. Keberadaan permukiman di sekitar industri memperlihatkan pola permukiman yang tidak teratur, kualitas bangunan yang sangat rendah, sanitasi yang sangat buruk, dan tidak adanya fasilitas kota yang memadai. Hal inilah yang disebut sebagai kawasan permukiman kumuh di sekitar daerah industri.

4.4. Perkembangan Daerah Pinggiran Perkotaan

Pada tahun yang sama Andrews [1942] dalam Daldjoeni (1992:165), dalam artikelnya yang berjudul “*Elements in the Urban Fringe Pattern*” yang dimuat dalam *Journal Of Land And Public Utility Economic Vol. 18* tahun 1942, mengemukakan pengenalan lebih mendalam mengenai daerah pinggiran kota. Menurutnya, daerah pinggiran kota masih dapat dibagi ke dalam zona yang lebih detail lagi. Untuk daerah yang berbatasan langsung dengan daerah kekotaan yang terbangun diistilahkan sebagai *urban fringe* atau *jalur bingkai kota* dan sementara itu untuk daerah di luarnya diistilahkan sebagai *rural-urban fringe* atau *jalur bingkai desa-kota*. Daerah pinggiran kota merupakan daerah yang menjadi sasaran perluasan kota secara terus menerus [*the active expanding sector of compact economic city*]. Jelas terlihat di sini bahwa penekanan pada sisi ekonominya. Daerah pinggiran kota dari segi kultural. Dapat digambarkan mengenai daerah pinggiran kota sebagai daerah pertanian/daerah yang didominasi oleh kegiatan pertanian namun mengalami pengaruh budaya kota [*urban fringe area as cultural development that takes place outside that boundaries of central cities and extends to the areas of predominantly agricultural activities*].

Daerah pinggiran kota merupakan daerah yang memiliki pemanfaatan lahan marginal bukan disebabkan karena keadaan tanah, topografi atau lokasi geografisnya, melainkan karena derajat aksesibilitas yang sangat bervariasi terhadap titik – titik sentral. Penduduk pedatang di daerah pinggiran kota berasal baik dari daerah kedsaan maupun datang dari daerah kekotaan sehingga daerah pinggiran kota

didefinisikan sebagai daerah yang di dalamnya terdapat percampuran kegiatan penduduk yang berorientasi pada kegiatan pertanian di satu pihak dan kegiatan non pertanian di pihak lain.

Duncan [1956] dalam Daldjoeni (1992:171) menggunakan istilah pinggiran kota untuk menggambarkan suatu daerah kekotaan [*urbanised area*] yang berada di pusat kota dan dihuni oleh penduduk desa [*the term fringe the non suburban population of the territory in urbanised areas outside the central cities*]. Selanjutnya sarjana ini mengemukakan adanya 3 perbedaan keruangan tentang daerah kekotaan [*urbanised areas*] yaitu [1] daerah pinggiran kota [*urban fringe areas*]; [2] daerah selaput inti kota [*suburbn areas*]; [3] daerah pinggiran kota [*urban fringe areas*]. Makin ke dalam kota, intensitas kekotaannya makin tinggi. Russwurm [1960] mendefinisikan daerah pinggiran kota suatu daerah diskontinu antara sifat kedesaan dan sifat kekotaan [*frontier of discontinuity between rural and urban landuse*]. Krausse [1978:68] mengemukakan daerah pinggiran kota terdiri dari dua jalur, yaitu [1] jalur proksimal [*inner margin*] dan [2] jalur destal [*outer margin*]. Jalur proksimal merupakan jalur yang ditandai oleh perkembangan yang lebih kontinu dan rapat sedangkan jalur destal adalah jalur yang ditandai oleh perkembangan sporadis dan bersifat lebih terpencar-pencar dan renggang. Dengan demikian daerah pinggiran kota sebagai daerah peralihan dimana pemanfaatan daerah kedesaan berangsur – angsur mengalami perubahan menjadi lahan kekotaan. Kekhasan daerah pinggiran kota ini

bukan terletak pada keseragaman kenampakan yang ada, namun justru terletak pada keanekaragaman kenampakannya.

Pryor [1970] dalam Isnaeni (1997:67), menggunakan istilah *rural-urban fringe* untuk menyebut daerah yang terletak diantara daerah kenampakan kedesaan sepenuhnya dan daerah berkenampakan kota sepenuhnya. Dia mengemukakan cara untuk mengenali lebih mudah batas daerah pinggiran kota dengan model segitiga pemanfaatan lahan desa-kota [*rural-urban landuse triangel mode*]. Melalui teknik ini Pryor menghitung prosentase pemanfaatan lahan kekotaan, pemanfaatan lahan kedesaan dan prosentase jarak dari lahan kekotaan utama [*urban built-up land*] ke bentuk lahan kedesaan utama [*real rural land*]. Penciptaan model ini didasarkan pada dua ide utama, yaitu [1] adanya kenyataan bahwa kebanyakan peralihan dari bentuk pemanfaatan lahan kekotaan ke bentuk pemanfaatan lahan kedesaan bersifat gradual ; [2] berlakunya konsep *distance decay principle*, dimana makin jauh dari jarak kota makin pudar ciri – ciri kekotaannya.

Dalam upayanya mengenali daerah pinggiran kota secara lebih mendalam, Pryor [1970] dalam Isnaeni (1997:72) masih dapat membagi jalur daerah yang terletak diantara berkenampakan kedesaan tersebut menjadi dua, yaitu ; [1] *urban fringe* [zona bingkai kekotaan/Zobikot], dan [2] *rural fringe* [zona bingkai kedesaan /Zobides]. Baik daerah bingkai kekotaan maupun daerah bingkai kedesaan merupakan daerah pinggiran kota yang ditandai oleh percampuran bentuk – bentuk pemanfaatan lahan kedesaan dan kekotaan. Secara berurutan, dari daerah kekotaan

sampai dengan daerah kedesaan ada 4 zona daerah yang menampilkan komposisi bentuk pemanfaatan lahan yang berbeda, yaitu; [1] zona kota [*urban area*] ; [2] zona bingkai kota [*urban fringe*]; [3] zona bingkai kedesaan [*rural fringe*] dan [4] zona kedesaan [*rural area*].

Daerah kota adalah daerah yang bentuk pemanfaatannya berorientasi kota/non pertanian sedangkan daerah kedesaan adalah daerah yang berorientasi pemanfaatan lahannya untuk kegiatan pertanian. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Pryor [1970] dalam Isnaeni (1992:87) dalam mengaktualisasi konsepnya adalah bagaimanacaranya menentukan batas – batas antara kota dan desa tersebut.

5. Proses Perkembangan Spasial Sentripetal

Proses perkembangan spasial sentripetal adalah suatu proses penambahan bangunan-bangunan kota yang terjadi di bagian dalam kota (*the inner parts of the city*). Proses ini terjadi pada lahan-lahan yang masih kosong di bagian dalam kota, baik berupa lahan yang terletak di antara bangunan-bangunan yang sudah ada, maupun pada lahan-lahan terbuka lainnya. Apabila proses perkembangan ini tidak mendapat perhatian yang ketat dan arif, dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap kehidupan kota. Monitoring yang ketat dan kompeten terhadap masalah perencanaan dan manajemen kota mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai perilaku kotanya. Di samping di setiap kota harus mempunyai visi yang jelas berkenaan dengan kehidupan kota baik dari segi sosial, ekonomi, kultural

maupun kondisi fisik spasialnya. Visi tersebut akan menjadi orientasi dalam merumuskan misi yang harus diemban oleh setiap institusi terkait dalam kerangka program perencanaan dan manajemen kota yang terintegrasi.

5.1. Jenis dan konsekuensi spasial dari perkembangan spasial sentripetal

Proses perkembangan spasial sentripetal adalah proses penambahan ruang untuk menampung kegiatan dengan mendirikan struktur bangunan-bangunan kekotaan yang terjadi di bagian dalam kota dan hal ini mengambil tempat di bagian-bagian yang memungkinkan dibangunnya struktur fisik dan bagian ini terletak di antara bagian-bagian yang sudah terbangun. Ada dua macam jenis perkembangan spasial sentripetal ini yaitu (1) Perkembangan horisontal dan (2) perkembangan vertikal. Perkembangan horisontal adalah proses penambahan ruang untuk mengakomodasikan kegiatan dengan cara mendirikan bangunan secara mendatar pada bagian-bagian yang masih kosong di bagian dalam kota dalam bentuk bangunan-bangunan tidak bertingkat. Perkembangan vertikal adalah bentuk penambahan ruang di bagian dalam kota dengan cara membangun bangunan bertingkat dengan tujuan memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengakomodasikan kegiatan.

Hal inilah yang menyebabkan mengapa proses perkembangan spasial sentripetal ini disebut juga proses pengisian ruang-ruang yang masih kosong (*the spatial infilling process/SIP*). Ditinjau lokasinya, ada tiga macam tipe SIP. SIP tipe satu terjadi di dalam daerah permukiman yang sudah terbangun (*the established settlements*), SIP tipe dua terjadi di luar daerah permukiman/ di lahan-lahan terbuka yang masih ada namun mempunyai kejelasan kepemilikan dan penguasaannya dan SIP tipe tiga di lahan-lahan terbuka seperti bantaran sungai, atau lahan tidur (*idle lands*) yang masih ada di bagian dalam kota, lahan-lahan kosong sepanjang rel kereta api atau sekitar stasiun dan lahan kosong lainnya yang tidak bertuan atau dianggap tidak bertuan.

SIP tipe satu terjadi di bagian dalam permukiman yang sudah ada, merupakan pembangunan yang berskala kecil dan pada umumnya merupakan pembangunan rumah mukim perorangan. Daerah permukiman yang sudah ada pada umumnya merupakan lahan resmi milik perorangan yang peruntukannya jelas dan status hukumnya juga jelas. Bangunan rumah dibangun pada lahan-lahan kosong di antara rumah-rumah yang sudah ada. Oleh karena pembangunan rumah dilaksanakan di bagian dalam suatu permukiman, kebanyakan bangunan berupa bangunan tidak bertingkat, jadi merupakan perkembangan horisontal semata. Perkembangan vertikal biasanya dilakukan di pinggir jalan utama. Pembangunan di pinggir jalan inilah yang telah menciptakan apa yang disebut sebagai shadow zone (SZ). SZ adalah jalur lahan//daerah permukiman yang terletak tepat di belakang deretan bangunan-

bangunan yang berada di sepanjang jalan utama. Deretan gedung-gedung ini menghalangi akses fisik ke bagian lahan/ permukiman yang terletak di belakang deretan gedung-gedung tersebut tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi dengan memanfaatkannya kedekatannya dengan jalur jalan utama karena tidak punya akses sama sekali terhadapnya. Sementara itu, harga pasaran lahan pada SZ sangat rendah di banding dengan jalur sepanjang jalan utama walau secara fisik jaraknya hanya berselisih puluhan meter saja. Inilah sebabnya mengapa kesempatan menekan lahan akan digunakan sebaik-baiknya oleh pemilik lahan bagian depan terhadap harga yang rendah. Pemilik lahan bagian depan akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan menganeksasi lahan bagian depan dengan bagian belakang. Pertama mereka dapat memperluas lahan, kedua mereka dapat mengangkat harga lahanya sama dengan bagian depan setelah menganeksasinya dan ketiga mereka dapat menekan harga lahan sedemikian rupa. Pemilik lahan pada SZ dengan sendirinya akan menjual pada pemilik lahan di depannya karena mereka mau mermbayar sedikit lebih tinggi dari pada harga pasaran lahan sebagai zona bayangan tersebut.

Pada kenyataanya proses densifikasi telah berjalan puluhan tahun tanpa adanya peraturan yang yang mengontrolnya, walaupun ada peraturan tersebut tidak diaplikasikan secara konsisten dan konsekuen. Proses ini mengakibatkan densifikasi yang hebat pada daerah perkampungan kota-kota di negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk

permukiman sebagai akibat pertambahan penduduk, baik karena pertumbuhan penduduk alami maupun karena migrasi yang terus-menerus telah memicu akselerasi densifikasi yang tidak terkontrol.

Munculnya permukiman kumuh (slums) di bagian dalam kota merupakan konsekuensi spasial karena adanya densifikasi bangunan permukiman di daerah permukiman sendiri yang tidak terkontrol tersebut. Densifikasi yang terus menerus dan tidak terkontrol adalah suatu proses yang diyakini merupakan salah satu penyebab terjadinya permukiman kumuh di kota. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pakar, ada tiga penyebab terjadinya permukiman kumuh. Proses-proses tersebut akan dijelaskan secara singkat di paragraf ini dengan tujuan memahami perbedaanya. Pembahasan mendalam akan dibahas pada paragraf tersendiri. Penyebab yang pertama adalah proses densifikasi yang terus-menerus dan tidak terkontrol, penyebab kedua adalah proses penuaan bangunan (*ageing process*) dan penyebab yang ketiga adalah proses penggenangan daerah permukiman (*inundating process*). Proses yang pertama sudah dijelaskan sebelumnya. Proses penuaan bangunan dapat memicu munculnya permukiman kumuh karena terkait dengan kualitas material bangunan itu sendiri. Pada komunitas yang tidak berdaya di bidang ekonomi, terkadang tidak mempunyai kemampuan untuk mengganti bahan-bahan bangunan yang sudah mulai melapuk, tidak mempunyai biaya untuk mengecat atau pemeliharanya lainnya sehingga bangunan-bangunan yang ada mulai melapuk dan memunculkan kawasan permukiman berkualitas rendah baik material maupun

lingkungannya. Proses penggenangan merupakan gejala yang kasuistik dan belum pernah ada pihak yang mengungkapkannya sebagai suatu teori penyebab munculnya permukiman kumuh. Hal ini muncul dari pengamatan penulis sewaktu mengadakan field work di kota Semarang dan khususnya pengamatan kawasan permukimannya. Di salah satu bagian permukiman kota Semarang yang terletak di bagian utara kota, khususnya sekitar stasiun Kereta Api Poncol, terjadi proses penggenangan yang terus-menerus. Penggenangan ini mengakibatkan melapuknya material bangunan permukiman. Perembesan air ke dinding rumah telah melapukkan dinding secara cepat, mengakibatkan karatan paku, engsel, selot serta peralatan rumah tangga yang terbuat dari besi karena air genangan juga mempunyai kadar garam yang tinggi. Penggenangan yang terjadi dan masuk ke bagian dalam rumah mengharuskan pemilik yang mampu untuk meninggikan pada bagian dalam rumah, namun bagi penduduk yang tidak mampu meninggikan lantai rumah mereka pasrah terhadap takdirnya. Makin banyak orang yang meninggikan lantai rumah, makin dalam genangan yang melanda bagian-bagian permukiman atau rumah-rumah yang tidak yang tidak ditinggikan lantainya. Oleh karena daerah perkampungan ini banyak terdiri dari golongan masyarakat menengah ke bawah, kebanyakan penduduk tidak mampu menindaklanjuti rehabilitasi rumah mereka dengan meninggikan tembok maupun menambah kekuatan fondasi bangunan. Akibatnya banyak bangunan yang mempunyai langit-langit rumah yang dapat dipegang dan jendela yang berubah fungsi menjadi pintu. Kondisi ini telah memunculkan bentuk permukiman kumuh baru di Indonesia, bahkan dunia.

Tidak berlebihan kiranya mengatakan bahwa sebagian besar permukiman kekotaan di negara berkembang, khususnya di Indonesia, terutama yang terletak di dekat dengan pusat kota telah mencapai titik kejenuhan bangunan permukiman, sehingga tidak ada lagi lahan kosong tersisa yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah. Kondisi inilah yang disebut sebagai death point. Sebenarnya, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa di Indonesia, sebagian besar permukiman yang terletak di dekat pusat kota adalah permukiman kumuh. Permukiman jenis ini ditandai dengan bangunan yang relatif kecil-kecil, berdempet-dempetan, fasilitas permukiman sangat kurang, kualitas bangunan yang rendah, dan kualitas lingkungan yang jelek. Inilah sebabnya maka daerah ini sangat rentan terhadap penularan jenis penyakit tertentu, seperti demam berdarah, malaria atau jenis penyakit lainnya yang gampang ditularkan melalui udara atau serangga/binatang tertentu pembawa penyakit.

Kepadatan bangunan berasosiasi dengan kepadatan penduduk, sehingga penularan penyakit akan sangat mudah karena intensitas kontak sosial juga sangat tinggi. Di samping rentan terhadap penularan penyakit tertentu, daerah yang sangat padat ini juga sangat rentan terhadap bahaya kebakaran. Kepadatan bangunan yang tinggi memudahkan terjadinya perembetan api dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Upaya pemadaman kebakaran terkadang menjadi sangat sulit karena fasilitas hidran yang sedikit atau tidak ada sama sekali serta jalur pendekat juga tidak ada. Apabila ada biasanya juga tidak dapat dilalui oleh mobil pemadaman kebakaran.

Banyaknya penghuni dengan berbagai latar belakang pendidikan, penghasilan, adat-istiadat menimbulkan berbagai macam perilaku yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran tersebut. Pada daerah semacam ini, penduduk bertindak sendiri-sendiri dalam mengembangkan jaringan internal listriknya yang sangat rentan memicu munculnya hubungan arus pendek yang selanjutnya dapat mengakibatkan kebakaran dalam skala yang luas. Cara memasak pun dapat menjadi pemicu munculnya bahaya kebakaran, khususnya bagi golongan masyarakat dengan status sosial yang rendah yang mungkin masih menggunakan kompor yang mudah meledak. Walaupun sangat sedikit yang menggunakan sistem penerangan dengan lampu minyak tanah perlu diwaspadai sebagai pemicu potensial bahaya kebakaran.

SIP tipe dua adalah prosa bertambahnya atau atau bangunan-bangunan non permukiman yang terjadi di luar daerah permukiman yang sudah ada, mengambil tempat pada lahan-lahan yang masih kosong namun jelas kepemilikan atau penguasaannya. SIP tipe dua ini dibedakan pula atas perkembangan horisontal dan perkembangan vertikal yang terjadi pada lahan-lahan resmi diluar daerah - permukiman terbangun dan dapat merupakan bangunan perumahan maupun fungsi-fungsi kota. Pembangunan struktur jenis ini biasanya mempunyai skala yang lebih besar dari pada SIP tipe satu, sehingga mudah diketahui dan di pantau. Pada umumnya, persyaratan pembangunan yang dilaksanakan sebagian besar sudah memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga kesesuaiannya dengan konsep tata ruang sangat mudah dilihat.

Di bagian pusat kota biasanya akan didominasi oleh perkembangan spasial vertikal dalam wujud bangunan bertingkat banyak (*high rise buildings/multistoried buildings*). Hal ini wajar karena daerah pusat kota merupakan daerah yang mempunyai aksesibilitas fisik paling tinggi dan sekaligus merupakan *Central Business District* di mana konsentrasi kegiatan ekonomi utama kota berada.

SIP tipe tiga adalah proses terjadinya permukiman atau bangunan non permukiman pada lahan-lahan yang 'tidak bertuan' atau 'dianggap tidak bertuan' karena penguasaan atau pemilik lahan tidak pernah mengurus lahannya dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan kesan bahwa lahan tersebut tidak ada yang mempunyai atau menguasai-XL1. Proses perkembangan spasial inilah yang harus diwaspadai karena munculnya permukiman atau bangunan non permukiman pada lahan-lahan yang tidak bertuan atau yang dianggap tidak bertuan tersebut dapat namun memicu munculnya permasalahan sosial maupun spasial di kemudian hari yang kadang-kadang sangat sulit dicari pemecahannya.

Oleh karena bangunan non permukiman biasanya meliputi areal relatif luas, maka pembangunannya sangat jarang berada di atas lahan tidak bertuan atau yang dianggap tidak bertuan. Namun, ada kemungkinan pula hal itu terjadi dan biasanya kalau hal ini sampai terjadi pasti ada kerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kewenangan memberi izin pembangunan. Perkembangan SIP tipe tiga Yang paling banyak tampak di bagian dalam daerah perkotaan adalah untuk bangunan tempat tinggal. Konsentrasi bangunan macam ini disebut permukiman liar (*squatter*

settlements). Permasalahan seperti ini banyak dihadapi oleh negara-negara lain juga, sehingga muncul berbagai istilah untuk bentukan permukiman liar tersebut antara lain *gecekondru di Turki*.

Secara garis besar ada dua macam tipe formatif permukiman liar ini, yaitu tipe Amerika latin dan tipe Asia Afrika (Drakakis-Smith, 1980:67). Tipe Amerika Latin adalah suatu tipe yang proses pembentukan permukiman liarnya terjadi secara besar-besaran dalam waktu *yang* relatif singkat dan menempati areal yang relatif luas. Tipe ini mempunyai proses pembentukan yang disebut sebagai *proses formatif invasi*, karena menyangkut suatu komunitas yang besar dan kemudian menempati areal tertentu yang dianggap tidak bertuan. Berdasarkan pengamatannya, Drakakis-Smith mengemukakan bahwa proses tersebut terjadi karena ada motivasi politik di dalamnya. Seperti diketahui bahwa kebanyakan negara Amerika Latin mempunyai kondisi politik, yang selatu berubah-ubah dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Perubahan regime penguasa yang selalu berganti-ganti mencerminkan perubahan warna politiknya. Regime penguasa adalah regime yang mempunyai dukungan politik yang besar dan untuk memperoleh dukungan untuk memperoleh dukungan besar dan ini antara lain dengan merekrut golongan masyarakat tertentu. Pemberian suara dari golongan tertentu tersebut akan berhasil kalau ada imbalan tertentu pula yang diinginkannya. Sebagai negara berkembang, negara-negara tersebut juga mempunyai penduduk miskin dalam jumlah yang banyak. Golongan inilah yang direkrut oleh organisasi politik tertentu dengan cara Tertentu dengan cara menjajikan akan memberi

sebidang lahan kepada mereka apabila golongan politiknya mampu memenangkan pemilihan presiden. Golongan miskin ini kemudian ditunjukan sebidang lahan tertentu untuk ditempati terlebih dahulu dengan bangunan seadanya dengan maksud menunjukkan eksistensinya. Oleh karena lahan yang ditempati tidak legal, maka golongan ini dikategorikan sebagai pemukim liar yang dilaksanakan sukses dalam artian bahwa calon mereka menang, mereka akan diberi ijin secara legal dan permukimannya dapat diubah menjadi permukiman yang tidak liar, namun kalau pemilihan umum tidak sukses permasalahan tetap akan muncul karena mereka sudah terlanjur bertempat tinggal di tempat itu dan sulit untuk disuruh pergi. Permukiman yang terbentuk akan tetap menjadi *squatter settlements*.

Permukiman liar tipe Asia-Afrika, adalah tipe permukiman liar yang terbentuk secara perlahan-lahan, dalam waktu yang relatif lama dalam proses *formatif infiltrasi*. Kedatangan pemukim-pemukim liar baru terjadi satu demi satu baik karena hubungan kerabat maupun karena kenalan senasib saja. Sebenarnya tipe ini mudah untuk mengatasinya, karena proses perkembangannya lambat asalkan pihak yang berwenang untuk menertibkan pembangunan permukiman bertindak secara sistematis. Penggusuran besar-besaran tidak perlu terjadi asalkan selalu ada monitoring yang teratur dan terus-menerus pada daerah-daerah yang diwaspadai sebagai daerah tidak beraturan. Begitu muncul permukiman liar, aparat harus cepat bertindak untuk melarangnya. Namun, hal ini tidak pernah dilaksanakan, sehingga apabila permasalahan lingkungan atau tata ruang kota muncul baru kemudian timbul

ide untuk menggusur daerah pemukiman liar yang sudah terlanjur ditempati oleh penduduk yang jumlahnya tidak sedikit. Tambahan lagi tidak jarang keberadaan permukiman liar dimanfaatkan oleh aparat untuk mencari penghasilan dengan memungut pajak tertentu. Disamping itu terlihat tidak adanya usaha terpadu dalam menangani munculnya permukiman liar.

Disatu sisi melarang, namun disisi lain terkesan mengijinkan dengan pemasangan jaringan listrik ke daerah-daerah tersebut dan penarikan pajak bumi bangunan atau apapun namanya. Warga penghuni mempunyai kesan adanya restu dari pemerintah dan mereka mempunyai hak untuk menghuni, karena telah membayar listrik yang telah dipasang dirumahnya. Apabila dikemudian hari pemerintah membutuhkan lahan tersebut untuk peruntukkan tertentu, maka usaha untuk mengambil lahan dengan cara menggusur paksa dan atau memindahkan mereka menjadi sedemikina sulit karena melibatkan penduduk yang tidak sedikit dan kadang terkesan tidak manusiawi karena menterlantarkan banyak keluarga dan anggota keluarganya. Kegiatan mereka untuk mencari nafkah, kegiatan sekolah anaknya dan kegiatan social lainnya menjadi terganggu serta mereka tidak tahu lagi mau berteduh dimana atau pergi kemana, kalau pemerintah tidak menyediakan terlebih dahulu lahan pengganti. Mereka juga merupakan warga kota yang karena keterpaksaan ekonomi telah melemparkan mereka ke daerah-daerah yang mungkin mereka tidak tahu kalau illegal.

5.2.Dampak Perkembangan Spasial Sentripetral

Secara fisik , dampak langsung yang dapat diamati adalah adanya *densifikasi bangunan* dibagian dalam kota dan bila tidak ada upaya manajemen dapat mengakibatkan *deteriorisasi lingkungan*. Dalam beberapa hal, proses densifikasi ini dapat menimbulkan keuntungan bagi pemerintahan apabila proses densifikasi ini terarah dan terkendali. Pada bagian-bagian tertentu yang masih belum dimanfaatkan dengan baik SIP tipe satu ,maupun tipe dua kecuali tipe ketiga adalah baik. Proses densifikasi yang terarah (*directed densification process*) adalah proses yang selalu dikonsultasikan dengan konsep tata ruang yang ada. Tata ruang yang telah diformulasikan dengan baik akan mengatur sebaran fungsi maupun kepadatannya sehingga setiap proses densifikasi pada bagian manapun dapat diarahkan mencapai ketentuan yang ideal. Sementara itu yang dimaksudkan dengan proses densifikasi yang terkendali (*controlled densification process*) adalah proses yang selalu dalam pemantauan ketat sehingga proses tersebut dapat dipacu atau diperlambat bahkan dihentikan manakala belum atau sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Kenyataan empiris menunjukkan bahwa proses densifikasi di Indonesia selama ini tidak sepenuhnya terarah dan terkendali (*uncontrolled densification process*), sehingga dampak negative yang tidak diharapkan telah muncul di berbagai kota besar yaitu *deteriorisasi lingkungan (environment deterioration)*, khususnya lingkungan permukiman. Khusus untuk kota-kota menengah dan kecil maupun di daerah pinggiran kota-kota besar yang merupakan daerah perkembangan permukiman baru, kegiatan pemantauan, pengarahan dan pengendalian harus sudah mulai

dilaksanakan sehingga kejenuhan dalam arti yang sebenarnya pada bagian dalam kota, khususnya dalam daerah permukiman dapat dihindarkan. Seperti telah dijelaskan pada bagian depan bahwa densifikasi bangunan merupakan salah satu proses, mungkin yang utama, pemicu deteriorisasi lingkungan dalam wujud munculnya permukiman kumuh di kota dan hilangnya ruang terbuka hijau di bagian dalam kota.

Padatnya bangunan permukiman telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan menurunnya habitabilitas lingkungan. Begitu padatnya bangunan akan menyulitkan pembuatan dan pembangunan sarana permukiman yang sangat datar merupakan suatu hal yang vital, karena mengatasi masalah genangan air dan atau kemungkinan banjir setempat. Saluran pembuangan limbah biak padat maupun cair berperan penting dalam memelihara kesehatan masyarakat. Padatnya bangunan banyak mempengaruhi kelancaran saluran, karena jaringannya terpaksa dibuat berkelok-kelok sesuai dengan gang-gang sempit yang ada hal ini sangat rentan terhadap terjadinya pengendapan limbah yang memupuk dan dapat mengakibatkan kebutuhan. Gang-gang sempit pada umumnya telah terjadi dan sangat sulit untuk diperlebar di daerah permukiman padat dan hal ini akan sangat menyulitkan akses mobil permadam kebakaran apabila di daerah tersebut terjadi kebakaran.

Daerah-daerah dengan kepadatan tinggi ini merupakan daerah yang paling rentan terhadap bahaya kebakaran. Oleh karena bangunannya berdempet satu dengan lainnya, proses penjaran api dari satu bangunan ke bangunan lain sangat mudah terjadi. Di

samping itu, pada umumnya bahan bangunan di daerah permukiman padat relatif merupakan bahan-bahan bangunan yang mudah terbakar. Sebenarnya pemasangan hidran merupakan prioritas pada daerah permukiman kumuh yang sangat padat bangunannya, namun lerhubung padatnya bangunan hal ini sangat menyulitkan pembuatan jaringan hidran yang mampu menjangkau ke seluruh bagian permukiman.

Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, di daerah permukiman dengan kepadatan sangat tinggi sangat sulit untuk menata *setting* bangunan dan jalan lingkungan permukiman. Oleh karena sejak awal perkembangannya, permukiman di daerah tersebut tidak pernah ada pengarahatan tata ruang permukiman mikro, maka struktur permukiman yang terbentuk sangat tidak teratur. Di dalamnya terbentuk gang-gang sempit yang mempunyai pola tidak teratur sesuai dengan ketersediaan ruang di antara permukim;n yang ada. Gang-gang ini terlalu sempit untuk dapat di;unakan sebagai prasarana mobilitas penduduk dan barang yang menggunakan sarana angkutan roda empat. Gang sempit yang berbelok-belok ini sering diistilahkan sebagai orong tikus (*rat alleys*). Bahkan di beberapa bagian pernukiman yang mempunyai lorong yang terlalu sempit, intuk membawa mayat saja mengalami kesulitan apalagi filewati oleh mobil pemadam kebakaran yang sangat dibutuhkan oleh daerah seperti ini. Habitabilitas permukiman jelas akan semakin menurun, karena keberadaan penduduk yang semakin meningkat dalam artian bahwa kebutuhan akan fasilitas permukiman akan semakin meningkat dan sementara itu

keberadaan utilitas umum tidak mengalami penambahan dan kondisi ini berarti memicu muncul gejala deteriorisasi lingkungan.

Uncontrolled densification dapat terjadi di bagian mana saja baik daerah permukiman maupun non permukiman. Di bagian non permukiman yang harus diwaspadai ada adanya kecenderungan mengorbankan ruang terbuka untuk kepentingan mendirikan bangunan baik permukiman maupun non permukiman. Hilangnya ruang terbuka di bagian dalam kota merupakan pemicu munculnya *island* dan meningkatnya kadar polusi udara di samping makin banyaknya kegiatan maupun kendaraan yang mengeluarkan gas buang yang sangat kotor. Keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting sekali dalam rangka menciptakan kota yang nyaman (*pleasant and liveable city*). Beberapa fungsi ruang terbuka hijau di kota adalah:

- 1) sebagai paru-paru kota (*urban lungs*);
- 2) sebagai pemberi keindahan dan kebersihan (*aesthetics sanitary*);
- 3) sebagai fasilitas sosial seperti olah raga, rekreasi, mentasan kesenian, atau pemakaman umum (*social facilities*);
- 4) sebagai jalur pengaman pada daerah bantaran sungai, daerah di bawah jaringan listrik bertegangan tinggi (*buffer zone (security function)*);
- 5) sebagai sumber pendapatan kota apabila dikelola dengan baik (*income generating functions*);
- 6) sebagai pemberi citra yang menarik (*beauty function*);
- 7) sebagai cadangan lahan (bank lahan) untuk pengembangan fungsi-fungsi

tertentu pada masa yang akan datang (*land bank function*)

- 8) sebagai penjaga keseimbangan lingkungan hidup kota antara lain sebagai penyejuk udara, pengurang polusi, memperbesar kapasitas resapan air permukaan (*environmental quality function*) (William, 1969; Latarjet, 1972, Yunus, 2004).

Hilangnya ruang terbuka hijau berarti hilangnya fungsi-fungsi tersebut di atas dan apabila hal ini sampai terjadi maka warga kota akan sangat kehilangan sesuatu yang sangat berharga sebagai suatu modal untuk mencapai apa yang disebut sebagai *sustainable city*. Hilangnya fungsi paru-paru kota berarti hilangnya kemampuan untuk menyaring udara kotor menjadi bersih, hilangnya fungsi keindahan dan kebersihan memicu perasaan bosan terhadap kenampakan yang monoton lahan kotor, hilangnya fungsi sebagai tempat rekreasi dan olah raga berkaitan erat dengan kualitas penduduk kota karena adanya ruang olah raga yang cukup dan tempat rekreasi yang memadai mengakibatkan kesehatan yang meningkat.

Hilangnya fungsi keempat karena keterpaksaan atau kenekadan dapat membahayakan penghuni, hilangnya fungsi kelima mengakibatkan peluang untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah menjadi hilang. Sebagai contoh *Li Botanical Garden* di Singapura, di samping pengunjung lebas masuk ke dalamnya, namun pada bagian-bagian tertentu dikemas sedemikian rupa di mana pengunjung yang ingin menikmati harus membayar, misalnya taman anggrek, Rosarium dan lain sejenisnya.

Fungsi pemberi citra ikonos yang menarik dapat menarik banyak wisatawan dalam negeri maupun nusantara dan hal ini akan berimbas positif terhadap meningkatnya kegiatan ekonomi penduduk maupun pendapatan asli daerah. Hilangnya fungsi ini berarti kesenipatan tersebut akan hilang pula. Fungsi bank lahan dalam beberapa hal memegang peranan kunci dalam mewujudkan visi kotanya, karena dengan masih tersedianya banyak lahan terbuka berarti makin memudahkan upaya pemerintah kota membenahi tata ruangnya. Pemanfaatan ruang milik pemerintah sendiri untuk keperluan pemerintah jelas tidak akan banyak mengundang permasalahan sosial yang berat. Hilangnya fungsi penyeimbang lingkungan hidup mengakibatkan ketimpangan yang makin besar antara subsistem lingkungan biotik, subsistem lingkungan abiotik dan subsistem lingkungan budayawan. Para pakar lingkungan berpendapat bahwa makin tidak harmonisnya hubungan antara ketiga macam subsistem lingkungan tersebut dapat berimbas pada merosotnya kualitas lingkungan hidup dan ini berarti kemerosotan kualitas sumber daya manusia dalam arti luas.

Ada beberapa kiat untuk mengatasi *uncontrolled denfication* yang sekaligus menghindarkan diri dari proses deteriorisasi lingkungan yang disebabkan yaitu (1) pemantauan yang terus-menerus terhadap penambahan bangunan baru; (2) konsultasi dengan tata ruang yang ada (3) aplikasi peraturan secara konsisten dan konsekuen dengan pengertian bahwa sanksi harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Oleh karena pada kenyataannya terlihat ada daerah permukiman yang baru berkembang, ada yang sudah berkembang dengan

kondisi yang belum kumuh, ada daerah permukiman yang sudah terlanjur kumuh maka kebijakan spasial yang diterapkan harus berbeda-beda sesuai dengan karakteristik lahan atau permukimanya.

6. Proses Perkembangan Spasial Secara Vertikal

Gejala perkembangan spasial kota secara vertical adalah proses penambahan ruang kota dengan menambahkan jumlah bangunan tertentu sehingga luas lantai bangunan akan semakin luas sering dengan bertambah banyaknya lantai bangunan tersebut. Bangunan-bangunan yang terbentuk adalah bangunan-bangunan bertingkat dari tingkat dua sampai puluhan tingkat yang kemudian dikenal dengan *skyscrapers*. Oleh karena tingginya bangunan yang menjulang seolah-olah mencapai langit, sehingga dijuluki gedung pencakar langit. Gejala munculnya gedung bertingkat banyak seiring dengan kemajuan di bidang teknologi konstruksi gedung serta makin langkanya ruang di bagian dalam kota untuk mengakomodasikan kegiatan yang terus berkembang karena tingginya bangunan yang menjulang seolah-olah mencapai langit, sehingga dijuluki gedung pencakar langit. Gejala munculnya gedung bertingkat banyak seiring dengan kemajuan di bidang teknologi konstruksi gedung serta makin langkanya ruang di bagian dalam kota untuk mengakomodasikan kegiatan yang terus berkembang.

Pada awal pertumbuhannya, suatu kota didominasi oleh konsentrasi kegiatan-kegiatan utama kota di bagian pusat kota dan dikelilingi oleh daerah permukiman. Kegiatan utama tersebut makin lama makin berkembang ke arah luar dan mendesak daerah permukiman di sekitarnya dan lahan itu terjadi secara terus-menerus. Daerah pusat kota merupakan daerah yang mempunyai derajat aksesibilitas paling tinggi, sehingga merupakan daerah paling ideal untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi kota. Sampai dengan dekade kedua abad 20, daerah pusat kota masih didominasi oleh bangunan-bangunan tidak bertingkat, namun setelah itu beberapa bangunan bertingkat mulai dibangun di pusat kota. Penyebab utamanya adalah upaya intensifikasi fungsi di bagian dalam kota, sejalan dengan makin langkanya lahan-lahan kosong dan makin tingginya frekuensi dan volume kegiatan kota.

Distribusi tata spasial kota pada awal pertumbuhannya berturut-turut dari pusat kota adalah daerah pusat kegiatan (*central business district*), daerah permukiman (*settlement zone*), daerah pinggiran kota (*urban fringe*) dan daerah pertanian (*agricultural zone*). Sebaran spasial tersebut menandai kota-kota kecil sampai menengah, sedangkan untuk kota-kota besar akan mempunyai ekspresi spasial yang berbeda, khususnya untuk daerah pusat kota. Makin bertambah luasnya kota secara horisontal sentrifugal, memicu tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru di bagian-bagian pinggir kota. Gejala ini ternyata telah membawa dampak negatif terhadap peranan daerah pusat kota sebagai pusat kegiatan, sehingga beberapa pemerintah

kota berinisiatif untuk mengadakan revitalisasi pusat kota dengan membangun bangunan bertingkat banyak yang tidak semata-mata dimanfaatkan untuk kegiatan komersial, namun juga untuk tempat tinggal. Perkembangan ini telah mengubah struktur tata ruang kota, khususnya di bagian pusat kota yang semula hanya berfungsi sebagai *business district*, kemudian juga berfungsi sebagai *residential district*, khususnya pada lantai-lantai bangunan yang berada di bagian paling atas. Sementara itu untuk lantai-lantai di bagian bawahnya berturut-turut adalah perkantoran dan bagian paling bawah adalah kegiatan *retailing*. Pengaturan pemanfaatan ruang semacam ini sebenarnya berkaitan erat dengan faktor kemudahan untuk mencapai bagian-bagian tersebut. Tinggi rendahnya aksesibilitas fisik pada gedung-gedung bertingkat banyak, akan dicerminkan dari jaraknya terhadap permukaan tanah. Makin dekat permukaan tanah makin tinggi aksesibilitasnya sehingga makin tinggi pula *space rent*-nya. Persaingan antara berbagai jenis kegiatan untuk menduduki posisi paling ideal dengan sendirinya akan dimenangkan oleh fungsi dengan kekuatan finansial paling tinggi dan fungsi tersebut adalah fungsi *retailing*. Rasio tersebut telah dikemukakan dengan baik oleh Bergel (1955) dalam Yunus (2005:65) dalam tesisnya mengenai *Build-Height Theory* yang menjelaskan mengenai *height decay principle* yang ternyata sejalan dengan *distance decay principle*. Untuk hal ini lihat buku Struktur Tata Ruang Kota (Yunus 2005:83).

Makin besarnya kota, makin banyak pula pusat kegiatan baru sekunder (*secondary business districts*) yang muncul dan akan terjadi siklus pemanfaatan

ruang yang mirip seperti halnya permunculan pusat kegiatan utama atau primair (*primary business district*) dan kemudian diikuti oleh bertambah banyaknya gedung-gedung bertingkat pada bagian ini. Secara transeksional, kota besar akan ditandai oleh gedung-gedung bertingkat banyak di pinggir pusat kota sebagai *the primary business district*, kemudian dikelilingi oleh daerah permukiman (*settlement zone*), kemudian terlihat permunculan pusat kegiatan sekundair (*secondary business district*) dengan perluasan vertikal yang masih sedikit. Makin besar dan luas kotanya akan memicu pemunculan pusat kegiatan tertiar (*tertiary business district*) dan begitu seterusnya. Sementara itu untuk kegiatan jasa seperti perkantoran, pendidikan dan kegiatan sejenis lainnya tidak menunjukkan pola tertentu. Namun searah dengan makin langkanya lahan kosong, beberapa kegiatan tersebut juga cenderung melakukan perluasan spasial secara vertikal. Beberapa Negara telah menengarai bahwa perkembangan spasial horizontal sentrifugal yang tidak terkendali akan berakibat negatif terhadap pemakaian energi dan materi dalam bentuk pemborosan energi dan materi karena luasnya wilayah kota, sehingga perluasan spasial vertikal dianggap sebagai salah satu cara mengantisipasi perkembangan kota-kota modern masa depan dan sekaligus menghindarkan diri dari pemborosan energi materi dan sumber daya termasuk sumber daya pertanian di daerah pinggiran kota.

Gejala Urban Sprawl Sebagai Pemicu Proses Densifikasi Permukiman di Daerah Pinggiran kota :

1. Gejala *urban sprawl* di daerah pinggiran kota (*urban fringe area*) telah mengakibatkan terjadinya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk selanjutnya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian ini akan mengakibatkan terjadinya proses densifikasi permukiman di daerah pinggiran kota.
2. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan oleh adanya proses densifikasi permukiman di daerah pinggiran kota ini, antara lain dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi maupun kultural serta dampak terhadap lingkungan fisik.
3. Untuk mengatasi permasalahan dampak negatif dari proses densifikasi permukiman tersebut perlu segera dilakukan tindakan baik preventif maupun kuratif untuk membatasi proses densifikasi permukiman di daerah pinggiran kota

B. KERANGKA BERPIKIR

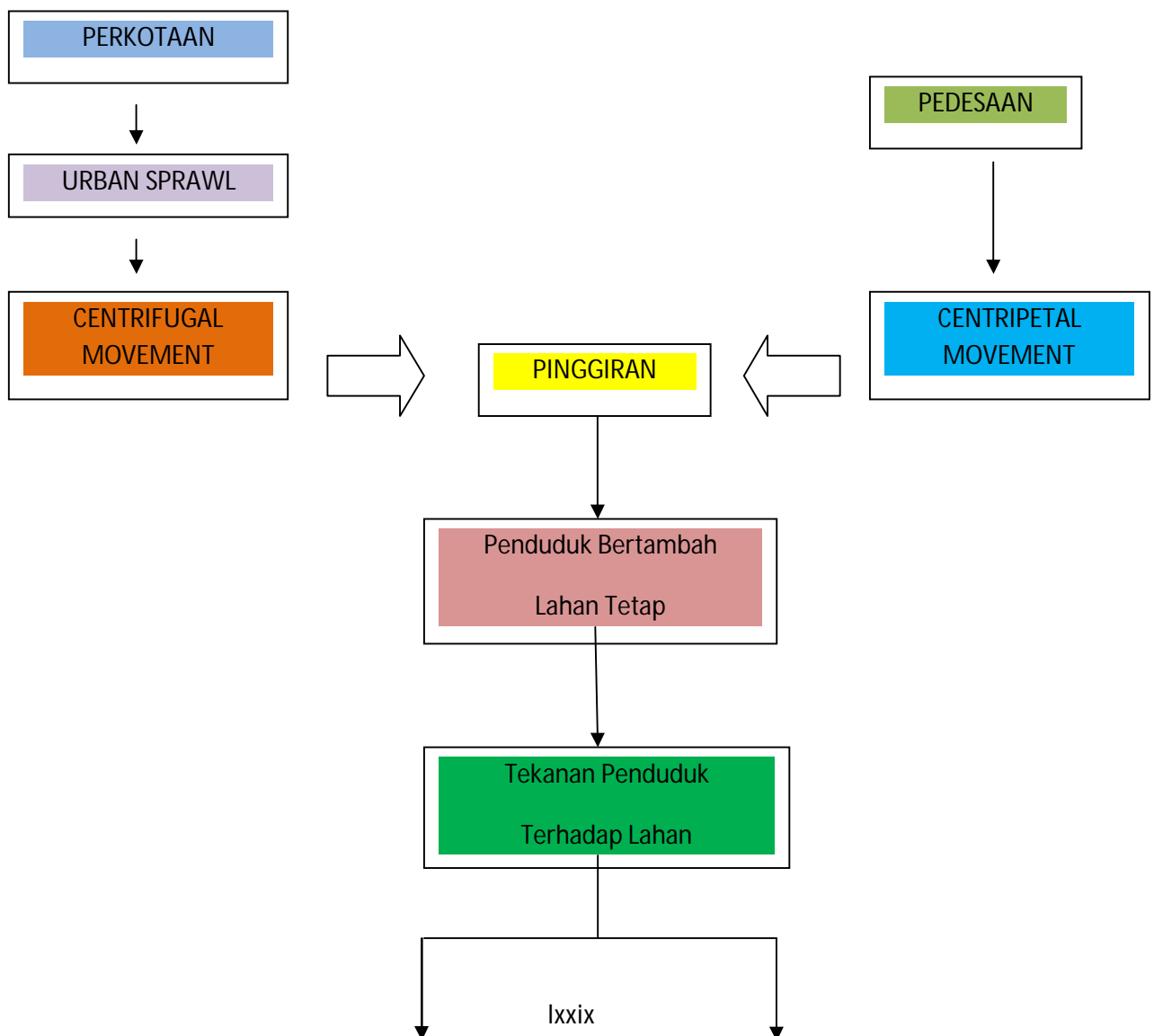
Dalam satu dasa warsa terakhir di daerah Jaten terlihat adanya perubahan penggunaan lahan yang signifikan. Perubahan penggunaan lahan ini sangat nyata perubahan dari lahan pertanian ke non pertanian. Perubahan lahan pertanian ini sebagai konsekwensi logis meningkatnya aktivitas manusia dalam memilih berbagai macam kebutuhan hidupnya. Perubahan lahan yang paling nyata adalah yang

dipergunakan sebagai lahan permukiman. Meningkatnya perubahan lahan dari pertanian ke permukiman sebagai suatu indikasi adanya gejala *urban sprawl*.

Jaten sebagai daerah pinggiran Kabupaten Karanganyar menerima langsung adanya dari dampak dari *urban sprawl*. Menurut pakar perkembangan daerah pinggiran tidak lepas dari adanya suatu gerakan keluar dari perkotaan menuju luar Kota yang disebut sebagai gerakan sentrifugal. Daya sentrifugal adalah gerakan yang mendorong gerak keluar dari penduduk dan berbagai usahanya lalu terjadi dispersi kegiatan manusia dan relokasi sektor-sektor ke daerah pinggiran Kota dalam hal ini dari perkotaan Surakarta menuju ke daerah pinggiran Kota yakni Jaten. Beberapa hal yang memungkinkan terjadinya hal tersebut yakni relokasi dan dispersi kegiatan manusia ke arah Jaten diantaranya adalah harga lahan yang relatif lebih murah dibandingkan di Kota Surakarta, kemudian ketersediaan lahan yang cukup luas mengakibatkan adanya relokasi industri (misalnya : industri garmen) dari Kota Surakarta ke Jaten. Permukiman dalam bentuk koloni-koloni yang teratur (perumahan) juga dalam dasa warsa terakhir menjamur di daerah Jaten.

Akibat dari adanya gerakan sentrifugal dari daerah perkotaan, gerakan sentrifugal ini juga didorong adanya kemudahan aksesibilitas dari Jaten ke Surakarta yakni ditandai dengan dibangunnya jalan dua arah oleh Negara pada tahun 1996. Hal ini mengakibatkan terisinya lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi lahan permukiman. Disamping itu dengan terbukanya akses jalan yang lebih baik maka bertambahnya kemakmuran secara pribadi masyarakat yang memungkinkan orang

untuk mendapatkan perumahan lebih baik, entah dengan menyewa atau membeli menjadi milik pribadi. Perkembangan daerah pinggiran seperti di Jaten juga dicirikan dengan munculnya permukiman-permukiman golongan menengah ke bawah yang dihuni oleh kaum buruh yang bekerja disektor industri dengan demikian di daerah pinggiran Kota seperti Jaten terlihat ada dua sisi wajah yang pertama munculnya permukiman-permukiman menengah ke atas sebagai akibat gerakan sentrifugal namun disamping itu wajah daerah pinggiran Kota seperti Jaten juga memperlihatkan permukiman yang dihuni oleh golongan menengah kebawah yakni para buruh pabrik yang justru datang dari daerah pedesaan. Penjelasan secara ringkas mengenai kerangka berpikir, disajikan dalam diagram alir di bawah ini:





Gambar 5. Diagram Alur Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian serta perumusan masalah yang ada, maka penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Karanganyar, namun karena luasnya daerah kajian, daerah penelitian dibatasi di bagian barat dari Kabupaten Karanganyar, yakni tepatnya di Kecamatan Jaten. Alasan akademis dari pengambilan sampel penelitian di daerah ini didasarkan pada survei awal yang memperlihatkan bahwa terjadi transformasi spasial yang sangat intens selama kurun waktu satu dekade terakhir.

Waktu penelitian, akan dilakukan berdasarkan jadwal di bawah ini:

Tabel 1: Jadwal Penelitian

No	JENIS KEGIATAN	BULAN						
		Mei	Juni	Juli	Jan	Feb	Maret	April

		'09	'09	'09	'10	'10	'10	'10
1.	Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal dan Perbaikan							
3.	Penyusunan kuisisioner			63				
4.	Pengadaan Citra							
5.	Perijinan							
6.	Kegiatan Lapangan							
7.	Tabulasi Data							
8.	Penyusunan draft Laporan							
9.	Ujian Tesis							
10.	Revisi Tesis							

B.Bentuk dan Strategi Penelitian

Menurut Tika (1997:6) penelitian deskriptif lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan

fakta-fakta yang ada, walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis. Penelitian deskriptif perlu memanfaatkan maupun menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus berfungsi dalam mengadakan suatu spesifikasi mengenai gejala-gejala fisik maupun sosial yang dipersoalkan. Disamping itu penelitian deskriptif harus mampu merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan teknik penelitian apa yang tepat dipakai untuk menyelesaikan hal tersebut. Hasil penelitian diutamakan untuk memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang benar-benar sesuai dengan situasi dan kemampuan guna mengungkapkan desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian yaitu berupa metode penelitian deskriptif spasial atau penelitian lebih ditekankan pada masalah keruangan pada daerah penelitian dengan analisis peta, analisis tetangga terdekat dan analisis tabel silang yang dilanjutkan dengan analisis frekuensi. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui tentang perkembangan permukiman, pola perkembangan yang terjadi dan faktor penyebab terjadinya proses urbanisasi di Kecamatan Jaten.

C.Sumber data

a) Data Primer

Data primer menurut Tika (1997: 67) merupakan data yang diperoleh dari responden atau obyek yang diteliti, atau ada hubungannya dengan yang diteliti. Data

primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Data primer tersebut meliputi:

- 1) Identitas responden, antara lain: nama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga
- 2) Pandangan responden terhadap arti dan nilai penting lahan.
- 3) Data jenis mata pencaharian penduduk, data tingkat pendapatan, data persepsi lingkungan perkotaan serta data aktualisasi diri masyarakat perkotaan.

b) Data Sekunder

Data sekunder menurut Tika (1997: 67) merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari dokumentasi adalah:

- 1) Data jumlah penduduk, komposisi penduduk, jumlah kepala keluarga daerah penelitian tahun 1998 dan tahun 2008
- 2) Data luas lahan dan penggunaan lahan daerah penelitian tahun 1998 dan tahun 2008
- 3) Data jumlah sarana dan prasarana ekonomi dan sosial daerah penelitian
- 4) Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar Jaten Citra Penginderaan Jauh, khususnya foto udara dan Citra Terametric tahun 1998 dan tahun 2008.
- 5) Peta landuse Wilayah Kecamatan Jaten tahun 1998 dan tahun 2008.

D. Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi menurut Tika (1997: 32) adalah himpunan individu atau obyek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Menurut Alfandi (2001: 50) populasi adalah keseluruhan atau himpunan semua hal yang ingin diketahui atau kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai *universum*. Populasi dalam penelitian adalah kepala keluarga yang terdapat di Kecamatan Jaten yang terbagi dalam 2 Desa yaitu menurut Bapak Triyono selaku Kepala Dusun Jaten, Desa Jaten mengungkapkan warga keseluruhan terdiri dari 232 KK dan menurut Bapak Subagyo selaku Kepala Dusun Ngringo, Desa Ngringo mengungkapkan terdiri dari 230 KK.

2. Teknik Sampling

Menurut Tika (1997: 33) sampel adalah sebagian dari obyek atau individu-individu yang mewakili suatu populasi. Arikunto (2002: 112) memaparkan, dalam penentuan sampel apabila subyek yang diamati jumlahnya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua tetapi jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung : kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, sempit luasnya wilayah pengamatan, dan besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sampel Gugus atau *Cluster Sampling*.

Teknik sampling yang digunakan adalah metode *Cluster Sampling* (sampel gugus) yaitu cara pengambilan sampel dengan membagi daerah atau wilayah yang luas menjadi daerah/wilayah-wilayah yang lebih kecil yang sama besarnya, akan

tetapi wilayah-wilayah yang lebih kecil tersebut tidak seluruhnya disampel. Berdasarkan pertumbuhan kepala keluarga maka pada Desa Jaten ada 50 sampel, dan pada Desa Ngringo ada 50 sampel sehingga jumlah seluruh sampel pada daerah penelitian ada 100 sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Alfandi (2001: 48) adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, teknik dokumentasi, dan wawancara.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian (Tika, 1997: 67). Dalam penelitian ini observasi dilakukan ke rumah-rumah dan perumahan yang baru dibangun. Usia bangunan baru kurang dari 12 tahun. Observasi dilakukan untuk mengetahui persebaran permukiman yang baru dan untuk mengetahui keadaan bangunan rumah tempat tinggal. Data yang diperoleh dari observasi data titik-titik perkembangan permukiman, data jarak perkembangan permukiman, proses permukiman dan kualitas permukiman.

b. Dokumentasi

Menurut Moleong (2002: 161) dokumentasi yaitu cara memperoleh data dari dokumen yang telah ada dimana dokumen itu sendiri berarti setiap bahan tertulis maupun film yang dipersiapkan karena adanya permintaan penyelidik. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan mengutip dari sumber data yang telah tersedia. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah data jumlah penduduk, komposisi penduduk, jumlah kepala keluarga daerah penelitian tahun 1998 dan tahun 2007, data luas lahan dan penggunaan lahan daerah penelitian tahun 1998 dan tahun 2007, data jumlah sarana dan prasarana ekonomi dan sosial daerah penelitian.

c. Wawancara

Menurut Moleong (2002: 135) bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dengan kepala rumah tangga yang dijadikan sampel untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi, Identitas responden, antara lain: nama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, alasan memilih tinggal dan kepemilikan lahan, pandangan responden terhadap arti dan nilai penting lahan. Wawancara bebas terpimpin yaitu pelaksanaan secara bebas tetapi berdasarkan pada kerangka yang telah tersusun sebelumnya (melalui kuesioner).

F. Validitas Data

Dalam penelitian ini untuk menjamin validitas data dipergunakan cara triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data itu dan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2002: 17).

Pada teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah dengan membandingkan data hasil observasi, dengan hasil wawancara atau pemberian questioner dan membandingkan dengan ini dokumen yang berkaitan, dalam hal ini data yang diperoleh dari kantor-kantor Kelurahan dan Kecamatan Jaten. Moleong (2002: 178) mengatakan bahwa “Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan kualitatif.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder dengan menggunakan berbagai analisis antara lain :

- a. Untuk mengetahui serta mengukur besaran transformasi spasial daerah pertanian ke non pertanian, khususnya permukiman di daerah pinggiran Perkotaan Surakarta dalam kurun waktu 1998-2008, serta transformasi spasial daerah pertanian ke non pertanian, khususnya Industri selama kurun waktu 1998-2008 analisis yang dipergunakan adalah dengan menginterpretasi citra multi temporal berdasarkan dua seri yakni tahun 1998 dan th 2008 data-data spasial yang ada dalam wujud data titik, data garis dan data poligon selanjutnya di overlay guna

mendapatkan data terakhir yang selanjutnya dianalisis dengan Sistem Informasi Geografis.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana perubahan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran seiring dengan perkembangan perkotaan Surakarta, dianalisis dengan menggunakan teknik tabulasi silang yang dilanjutkan dengan deskripsi untuk mengetahui sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi selama proses *urban sprawl* berjalan.

H. Prosedur Penelitian

Secara garis besar beberapa tahap yang dilakukan dalam penelitian Proses Urbanisasi di Kecamatan Jaten sebagai daerah pinggiran Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada tahap persiapan dicari semua referensi yang dapat menguatkan penelitian. Hal ini dilakukan dengan kajian teoritik menggunakan kepustakaan atau literatur yang relevan dengan masalah. Orientasi lapangan dilakukan untuk mengetahui jenis dan kelengkapan data lainnya yang diperlukan dalam penelitian, dengan jalan menghubungi atau mendatangi kantor atau instansi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penyusunan Proposal

Tahap penyusunan proposal merupakan tahap awal penelitian. Proposal dibuat menurut kaidah penulisan karya ilmiah yang meliputi tiga bab yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Ketiga bab tersebut mencakup tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori serta metodologi yang dipakai dalam penelitian.

3. Penyusunan Instrumen

Pada tahap penyusunan instrumen disiapkan seluruh keperluan yang menyangkut penelitian. Pada tahap ini dilakukan penyusunan daftar pertanyaan wawancara. Tabulasi data mengenai data penduduk yang akan diwawancarai agar lebih memudahkan dalam melakukan pencatatan data yang diperlukan. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara mengenai alasan penduduk memilih bertempat tinggal di rumahnya dan keadaan sosial ekonominya.

4. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan guna mengumpulkan data primer dan sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer yang merupakan data yang berkaitan dengan citra, peta akan dilakukan dengan cara interpretasi langsung, citra didapat dari pengadaan lewat BAKOSURTANAL serta data terkini dari citra Terametric didapat dari Google Earth.

- b. Data dari penduduk yang berkaitan dengan mata pencaharian, tingkat pendapatan dan persepsi didapat langsung dari penduduk yang pandu melalui kuesioner.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pada tahap analisis data dilakukan kegiatan menganalisis data dan mengorganisasi data yang diperoleh. Pada penelitian menggunakan beberapa analisis data yang meliputi analisis data primer dan analisis peta. Dalam tahap ini dilakukan pengklasifikasian data, penggambaran peta, dan analisis peta. Pengklasifikasian data meliputi pemilahan data yang diperlukan dan dikelompokkan sesuai dengan kegunaan data tersebut. Penggambaran data meliputi kegiatan desain tata letak, desain peta dasar, dan desain isi peta berdasarkan kaidah-kaidah kartografi. Analisis peta dilakukan secara deskriptif geografis dengan menggunakan analisis peta, dan tabel silang yang kemudian dilanjutkan dengan analisis frekuensi untuk menentukan faktor yang paling berpengaruh yaitu dengan melihat frekuensi terbanyak dari jawaban responden.

6. Penyusunan Laporan

Pada penyusunan laporan ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap terdahulu selesai dilakukan kemudian disusun dalam sebuah tesis. Penyusunan laporan penelitian disesuaikan dengan kaidah penulisan laporan karya ilmiah. Laporan penelitian dibuat dalam bentuk tesis yang dilengkapi dengan peta-peta dan lampiran-lampiran.

